



SURVEI

PERSEPSI PEMILIH PEMULA PADA PEMERINTAH, KORUPSI, DAN PEMILU NASIONAL 2014

LATAR BELAKANG

Pemilu 2014 adalah momentum perubahan. Masyarakat sipil dan media dapat mengambil porsi untuk mempengaruhi dan mengarahkan perubahan. Keterlibatan para pemilih dalam gerakan perubahan melalui pemilu menjadi keniscayaan yang sangat tidak boleh dilupakan peluangnya. Berawal dari para pemilihnya dan pilihannya pada Pemilu 2014 nanti, keberadaan STRANAS PPK dan bahkan KPK sebagai lembaga pemerintah utama pengiat gerakan integritas dan antikorupsi bagi pemerintah dan publik menjadi pertarungan. Jika Pemilu 2014 gagal menghadirkan politisi dan pemerintahan yang memiliki integritas dan bersih, kemungkinan keberadaan STRANAS PPK dan KPK akan semakin menciut.

Keterlibatan dalam memberikan hak suara di dalam pemilihan umum biasanya dikaitkan dengan apa yang disebut “warga yang aktif”, terutama sekali jika keterlibatan tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan bukan karena diwajibkan. Warga selalu berkait dengan apa yang umumnya disebut “tanggungjawab” (*duties*) dan “kewajiban” (*obligations*) yang secara tradisional secara sederhana diartikan sebagai sikap tunduk pada aturan dan hukum sebagai timbal-balik bagi perlindungan hukum itu sendiri, di mana kewajiban warga pula untuk menghormati hak dan kebebasan (Crick, 2002: 104-105). Penggunaan hak suara di dalam pemilihan umum dipandang sebagai prasyarat minimal seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang warga, meski hal itu bukan satu-satunya aktivitas yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku warga. Namun, dalam banyak diskusi mengenai kewargaan, pemilihan umum menjadi ukuran paling minimal sejauh mana warga aktif terlibat dalam pemenuhan tanggung jawabnya bagi pengelolaan negara untuk masa-masa mendatang. Menariknya, jika melihat profil pemilih dalam Pemilu 2014, 30 persennya adalah pemuda (berusia antara 17-30 tahun). Dalam hal ini pula, survei ini ingin menelaah bagaimana pemilih pemula muda di Jakarta memaknai pemberian hak suara serta pemerintahan seperti apa yang mereka harapkan terpenuhi melalui pemilihan umum.

Secara umum terjadi penurunan partisipasi dalam memberikan hak suara pada setiap pemilu semenjak tahun 1999. Menurut Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi, angka tingkat partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92%, Pemilu 2004 sebesar 84% dan Pemilu 2009 sebesar 72% (*Tempo.co*, 26 Agustus 2013). Gejala ini bisa dikorelasikan dengan hasil temuan survei di mana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemberantasan korupsi sangat rendah. Korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan politik. Kasus-kasus korupsi skala besar yang menghiasi media massa pada umumnya melibatkan petinggi atau tokoh partai politik, pejabat tinggi pemerintah (pusat dan daerah), pejabat tinggi penegak hukum (kehakiman, kejaksaan dan kepolisian) serta politisi di DPR. Survei yang dilakukan KPK menunjukkan 92.70% responden menyatakan bahwa pemimpin yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia (KPK, 2013: 12). Hubungan ini bisa jadi terkait satu dengan lainnya. Ketidakpercayaan publik terhadap para pejabat publik, juga mendorong ketidakpercayaan pada sistem penopangnya. Pemilu di Indonesia hari-hari ini dimaknai sebagai sarana yang hanya akan menghasilkan perilaku berulang para pejabat publiknya (nasional maupun daerah), yakni korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Persepsi akan keniscayaan yang demikian yang mendorong terus merosotnya angka partisipasi dalam pemilu, karena pemilu dinilai tidak akan menghasilkan pemerintahan yang mampu melakukan perubahan yang berarti.

Namun, pemilih pemula merupakan segmen khusus yang memiliki antusiasme tertentu menggunakan hak suaranya untuk kali pertama keikutsertaan mereka dalam pemilu. Antusiasme ini pula yang perlu untuk dipahami lebih jauh, seperti apa antusiasme itu akan mereka tuangkan dan untuk apa? Seberapa besar mereka memahami saluran itu akan mengarah kepada apa yang mereka harapkan bagi kehidupan mereka dan masyarakat umum menjadi lebih baik? Ataukah hanya menjadi saluran antusiasme semata, sebagai aktivitas pertama kali untuk menggunakan hak suara mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong untuk menelusuri seberapa besar keinginan pemilih pemula muda di Jakarta menggunakan hak suara mereka. Lalu, seberapa jauh mereka punya pandangan mengenai pemerintahan yang ikut mereka tentukan nantinya.

Untuk itu, Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) mengadakan survei kepada pemilih pemula muda mengenai persepsi mereka terhadap komitmen pemerintah melawan korupsi. Survei ini akan menjadi *baseline* penilaian pemilih pemula muda mengenai kondisi pemerintah memberantas korupsi. Selain itu survei ini juga memotret persepsi pemilih pemula terhadap profil kandidat Pemilu 2014. Pemuda adalah aset yang banyak

dipaparkan sebagai penggerak perubahan. Di sini, pemuda memiliki aset besar mempengaruhi hasil pemilu sebagai pemilih yang mengerti akan refleksi pimpinan periode sebelumnya dan profil kandidat berintegritas dan bersih.

Survei diadakan untuk para pemilih pemula muda yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan menyoar 1000 responden. Survei ditempuh selama bulan Februari 2014. Proses pendalaman data kuantitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*).

DESAIN PENELITIAN

Konsep dan variable survei

Survei ditujukan untuk melihat sejauh mana pemilih pemula muda memandang pemilu dan demokrasi Indonesia secara umum dengan berpijak pada pandangan mengenai pemerintahan bersih sebagai fokus survei. Dari survei ini diharapkan dapat dibuat sebuah gambaran mengenai kalangan muda di Jakarta dan harapan-harapannya tentang Indonesia yang demokratis dan bersih, dan melihat serta menilai bagaimana Indonesia saat ini dan harapannya untuk Indonesia masa datang.

Ada tiga hal pokok yang ingin digali dalam survei ini, yaitu:

- (1) pandangan kalangan muda pemilih pemula terhadap persoalan korupsi di Indonesia dan upaya pencegahannya;
- (2) pandangan kalangan muda pemilih pemula mengenai demokrasi sebagai sarana paling baik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- (3) pandangan kalangan pemilih pemula muda mengenai pemilihan umum 2014 sebagai ruang bagi upaya pembentukan pemerintahan yang bersih.

Bagian *pertama* yang digali adalah bagaimana mereka melihat persoalan korupsi akhir-akhir ini dan bagaimana menumbuhkan watak integritas sebagai syarat mutlak bagi upaya pemberantasan korupsi. Dalam survei juga digali sejauh mana kalangan muda bersikap toleran dan permisif terhadap perilaku curang dan korup, seperti menyuap dan menyogok untuk memperlancar berbagai urusan, serta alasan-alasan yang mendasari mengapa tindakan demikian dipilih.

Selain digali pandangan mereka mengenai korupsi dan betapa buruk dan bahayanya akibat yang disebabkan, namun di sisi lain juga digali tindakan serupa yang mereka alami jika berhadapan dengan beragam aparaturnegara. Dalam pokok pertama ini berhasil digali mengapa kerap terjadi ambivalensi di kalangan muda dalam berhadapan dengan soal-soal korupsi, di satu sisi menolak dengan tegas, di sisi lain mengambil jalan pintas jika terbelit persoalan yang mendorong mereka melakukan suap atau sogok. Di bagian ini dilema antara keperluan akan watak integritas dan lingkungan yang terus meluluhkannya digali dan dikemukakan. Pada bagian ini juga ditelusuri bagaimana dan sejauh mana responden mau terlibat dalam kegiatan pemberantasan korupsi.

Bagian *kedua*, pandangan responden terhadap politik dan demokrasi sebagai sebuah sistem. Survei ini berangkat atas dasar asumsi bahwa politik yang bersih dan baik hanya mungkin diselenggarakan dalam sebuah sistem yang demokratis. Sistem yang demokratis di sini mengacu pada definisi paling sederhana. Demokrasi secara harafiah umumnya dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat secara keseluruhan ketimbang pemerintahan oleh sekelompok orang, kelas atau kepentingan di dalam masyarakat. Dalam konteks penerapannya demokrasi umumnya secara sederhana pula diartikan sebagai prosedur pengambilan keputusan di dalam setiap kelompok, perkumpulan ataupun masyarakat, di mana setiap anggotanya memiliki hak yang sama dan setara untuk mengeluarkan pendapatnya dan membuat apa yang menjadi pandangan mereka mereka dihitung (Beetham, 2006: 1).

Indikatornya: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers, persamaan setiap orang di depan hukum, kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh sesuatu, hak yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam praktiknya Demokrasi banyak dipahami sebagai: pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan oleh wakil-wakil rakyat, pemerintahan oleh partai milik rakyat, kesejahteraan rakyat,

partisipasi politik yang maksimum, sistem multi-partai, kemajemukan sosial dan politik, kebebasan sipil dan politik, hak warganegara yang setara, masyarakat bebas dan terbuka, dan masyarakat sipil (Beetham). Pemahaman yang demikian yang dikedepankan pada setiap responden untuk memberikan penilaian mereka tentang demokrasi.

Demokrasi di sini dihadapkan secara diametral dengan kediktatoran. Kediktatoran di sini secara sederhana digambarkan sebagai sistem pemerintahan di mana satu orang, kelompok atau faksi memiliki kekuasaan penuh untuk mendiktekan seluruh tindakan politik dan memaksa kepatuhan pada seluruh warganegara. Dalam sistem yang diktator kebebasan warga sangat dibatasi, kebebasan pers dibatasi, hak-hak warganegara kerap diabaikan, masyarakat dibuat tertutup, kebebasan berorganisasi sangat dibatasi, partisipasi politik sangat minimal jika ditiadakan sama sekali. Dalam rentang ekstrim demokrasi-kediktatoran responden diminta membayangkan Indonesia berada di titik mana dalam rentang tersebut, dan bergerak ke titik mana yang mereka harapkan.

Korupsi, Pemilu dan Demokrasi menjadi fokus survei dalam melihat bagaimana kalangan muda pemilih pemula melihat dan memaknai korupsi dan upaya pencegahannya.

Bagian *ketiga*, pandangan responden mengenai Pemilu 2014. Soal pemilu dan pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan erat karena aktor utama pemberantasan korupsi adalah negara (legislatif, eksekutif, yudikatif), di mana pemilu merupakan ruang untuk memilih dan menetapkan para pengambil kebijakan di bidang legislatif dan eksekutif. Pemerintahan dan kebijakan politik yang terbentuk melalui pemilu nanti yang akan memiliki peran besar dan menentukan dalam pemberantasan korupsi. Dalam survei ini digali bagaimana responden memaknai pemilu dan keterkaitannya dengan tanggung jawab sebagai warga dan ruang bagi penciptaan pemerintahan yang bersih dan mampu memberantas korupsi. Pada bagian ini responden digali tertarik/ridaknya kepada pemilu melalui sejauhmana mengenali calon-calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan KPU di wilayah mereka, serta calon-calon presiden yang sudah marak diberitakan di media massa. Di sini responden juga digali tingkat kepercayaannya pada institusi-institusi penopang pemilu seperti partai, caleg dan capres/cawapres. Dari semua variabel yang yang dirumuskan dalam kuisisioner terdapat gambaran pemerintahan seperti apa yang diharapkan, pemilu bagaimana yang diinginkan, dan kenyataan seperti apa yang mereka bayangkan sesungguhnya, di samping-ideal-ideal yang sebelumnya mereka harapkan.

Korupsi, Pemilu dan Demokrasi menjadi fokus survei dalam melihat bagaimana kalangan muda pemilih pemula melihat dan memaknai korupsi dan upaya pencegahannya. Pemilu sebagai medium, dan demokrasi sebagai sistem merupakan wahana yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi sekaligus menumbuhkan sikap integritas, baik di kalangan masyarakat maupun para pejabat publik.

Sampel & Kriteria Responden

Sampel dalam survei diambil dari populasi pemilih pemula di Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU DKI Jakarta terdapat kurang lebih 738.803 jumlah pemilih yang berusia 17-21 tahun (pemilih pemula). Keterbatasan waktu, biaya dan kendala teknis, survei ini tidak mengambil data dari Kepulauan Seribu. Dengan demikian sampling DKI Jakarta hanya meliputi Kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Secara proporsional jumlah responden dibagi hingga ke level kecamatan di kelima wilayah tersebut. Dari 1000 kuisisioner yang tersebar yang kembali dan layak diolah adalah 933 orang. *Margin of error* yang dapat terjadi sebesar +/- 2,3%. Teknik sampling yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Jumlah sample yang diharapkan secara proporsional dibagi ke level kecamatan, lalu kemudian ke level kelurahan. Proporsi ini mencakup juga perbandingan laki-laki dan perempuan. Survei tidak dimaksudkan untuk mengeneralisir kondisi pemilih pemula secara nasional.

Waktu Pelaksanaan: 9-22 Februari 2014

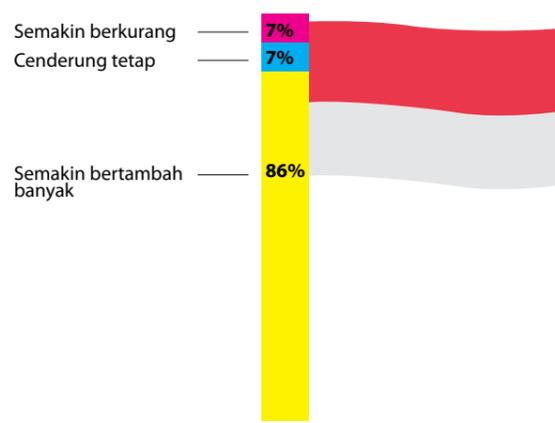
HASIL SURVEI

PERSEPSI PEMILIH PEMULA MUDA AKAN KORUPSI DI INDONESIA

Pandangan akan korupsi

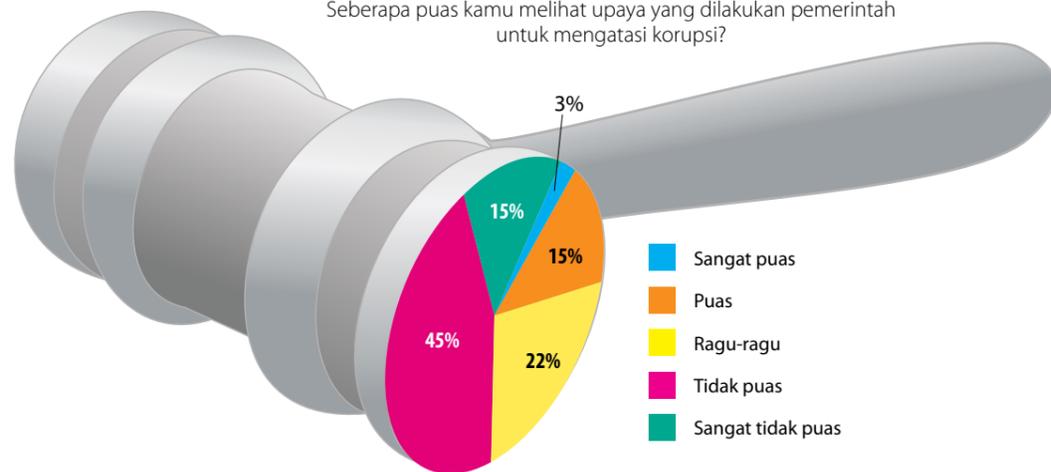
Korupsi terjadi di semua negara di dunia, hanya saja kondisinya berbeda-beda di tiap-tiap negara. Bagi pemilih pemula muda di Jakarta, ketika ditanyakan persepsi mereka akan kondisi korupsi di Indonesia pada tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya, 85% menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin bertambah banyak, 7% menyatakan cenderung tetap dan 7% menyatakan adanya penurunan (Lihat grafik 1).

Grafik 1
Bagaimana korupsi di Indonesia pada tahun 2013 dibanding tahun-tahun sebelumnya



Bisa dikatakan bahwa mayoritas responden menganggap korupsi di Indonesia pada tahun 2013 lebih buruk kondisinya dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang paling menonjol adalah peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas berbagai upaya yang sudah dilakukan, hanya 18% responden yang merasa puas (15% puas, 3% sangat puas), ada 60% yang merasa tidak puas (45% tidak puas, 15% sangat tidak puas). Sejumlah 22% responden menyatakan ragu-ragu (lihat Grafik 2). KPK berhasil mengungkap banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara, hal ini merupakan keberhasilan upaya melawan korupsi, akan tetapi di sisi lain justru semakin menyibakkan akan banyaknya kasus dan luasnya pelaku korupsi di Indonesia.

Grafik 2
Seberapa puas kamu melihat upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi korupsi?

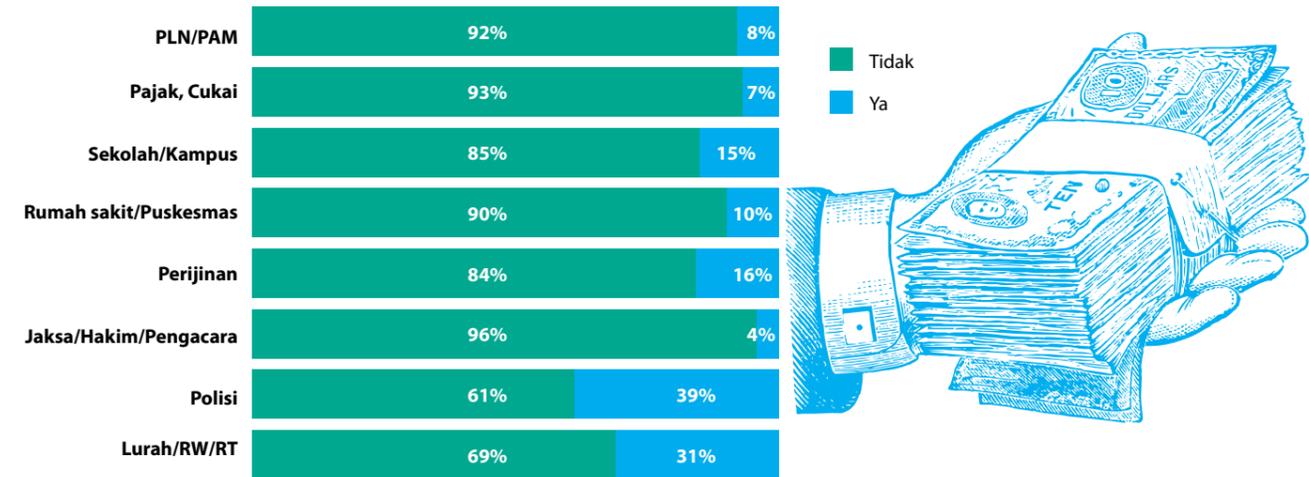


Pengalaman akan suap

Suap adalah salah satu bentuk dari tindakan korupsi. Suap dapat dilakukan siapa saja tanpa harus memiliki kedudukan atau kekuasaan tertentu. Seringkali suap dilakukan untuk mempercepat suatu proses atau guna menghindari suatu sanksi atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada responden ditanyakan apakah ada bagian dari anggota rumah tangga mereka yang terlibat upaya suap dalam setahun belakangan berhubungan dengan sejumlah layanan publik. Layanan publik yang dimaksud seperti layanan listrik/air, urusan bea dan pajak, pendidikan, kesehatan, perijinan, hukum, kepolisian, dan birokrasi di lingkungannya. Pada bagian sebelumnya diketahui bahwa mayoritas remaja atau pemilih pemula muda di Jakarta mempersepsi korupsi semakin memburuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Persepsi ini ternyata berbeda dengan realita di keseharian mereka. Mayoritas responden menyatakan tidak ada anggota keluarga mereka yang terlibat dengan perkara suap berkaitan dengan sejumlah

layanan publik yang diajukan (lebih dari 80% menyatakan tidak ada), kecuali untuk polisi dan pejabat di tingkat kelurahan. Angka tertinggi yang menyatakan mengetahui kejadian suap ada pada kepolisian (39%) dan pejabat RT/RW/Lurah (31%).

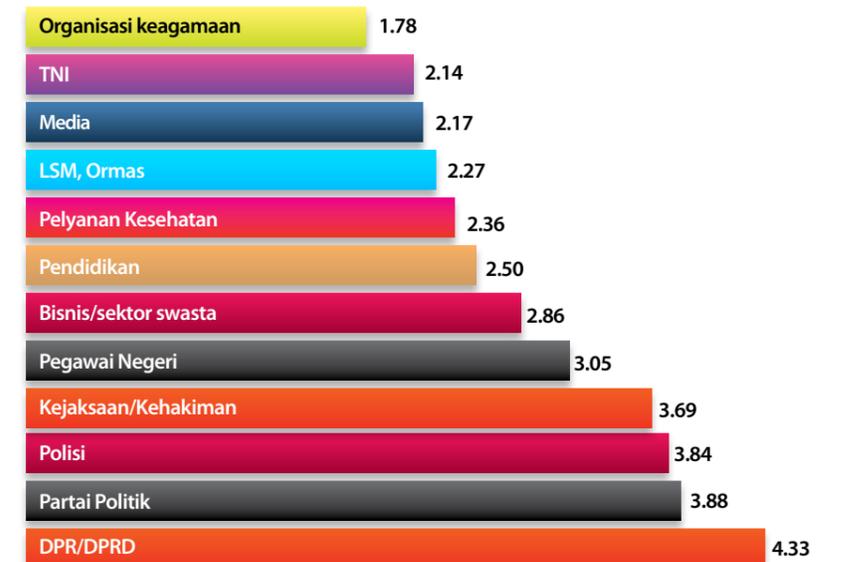
Grafik 3
Memberikan uang/barang kepada petugas terkait tugas, wewenang dan jasa mereka dalam 12 bulan terakhir



Opini terhadap institusi publik

Kesejahteraan publik diselenggarakan oleh sejumlah institusi, seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, lembaga peradilan, penegak keamanan dan ketertiban, birokrasi pemerintah, dan lain-lain. Jika institusi publik ini bekerja optimal maka kesejahteraan masyarakat semakin nyata. Dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan dalam mengelola institusi publik tersebut. Responden diminta untuk menilai seberapa korupkah sejumlah institusi publik (seperti yang terlihat pada grafik 4) dengan memberi penilaian skala 1 hingga 5, dengan angka 1 mewakili penilaian "sama sekali tidak korup" hingga 5 yang berarti "sangat korup". Setelah diitung nilai rata-ratanya, maka diperoleh skor persepsi korupsi dari responden sebagai berikut:

Grafik 4
Skor
Skala 1-5
(1 "sama sekali tidak korup",
5 "sangat korup")



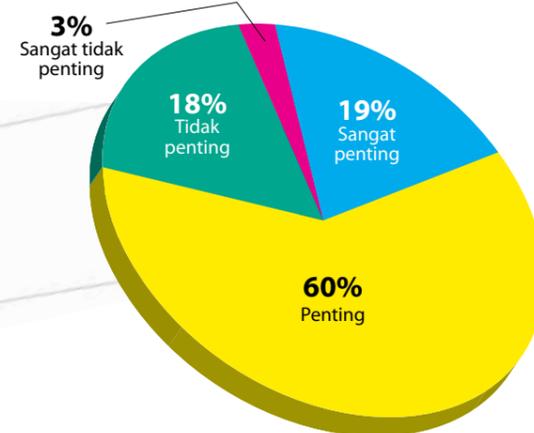
Dari sejumlah institusi penyelenggara kepentingan publik, lembaga legislatif DPR dipersepsikan paling korup (skor 4,3), kemudian berturut-turut partai politik (3,8) dan polisi (3,8). Sejumlah kasus korupsi yang muncul sebagai berita utama di media dalam dua tahun terakhir adalah kasus yang melibatkan peran anggota DPR dan elite partai politik. Persepsi bahwa polisi korup tidak saja karena adanya berita mengenai perkara korupsi yang melibatkan petinggi polisi, tetapi juga lebih didominasi akan pengalaman dan cerita mengenai perilaku polisi di lapangan. Responden

yang berusia remaja dan dewasa muda kebanyakan beraktivitas menggunakan sepeda motor dan angkutan umum sehingga memiliki kedekatan interaksi dengan polisi lalu lintas.

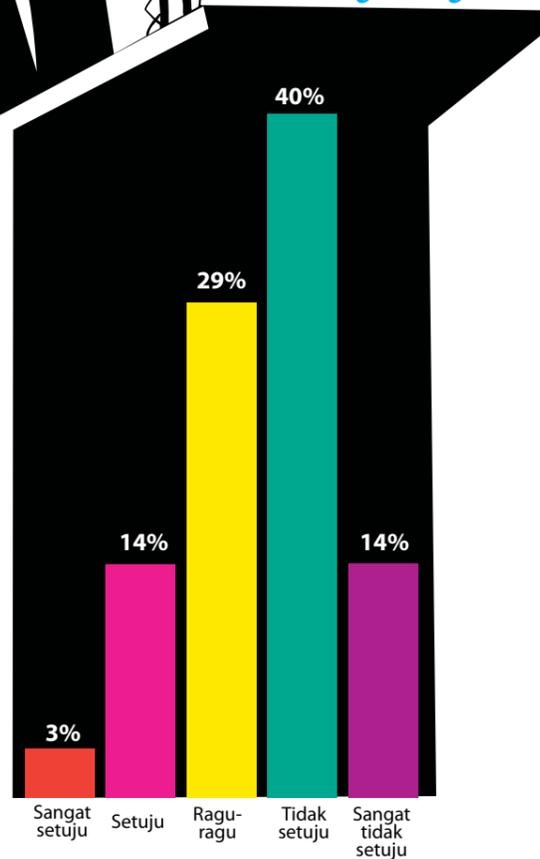
Perluah 'koneksi'?

Bentuk korupsi yang lain adalah jika kebijakan sektor publik dapat dipengaruhi, sehingga alokasi sumber dayanya lebih memberi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. "Koneksi" adalah istilah yang awam dipakai bagi seseorang yang punya pengaruh ke dalam birokrasi. Ia bisa saja orang di dalam birokrasi itu sendiri atau juga orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat publik yang berwenang. Untuk itu kepada responden ditanyakan jika berurusan dengan sektor publik, apakah penting memiliki 'koneksi' agar urusan menjadi lancar. Mayoritas responden mengananggap hal tersebut penting, 60% menyatakan penting dan 19% menyatakan sangat penting.

Grafik 5
Apakah menurut kamu penting untuk mempunyai koneksi supaya urusan menjadi lancar



Grafik 6
Cara pemerintah melawan korupsi sudah efektif



Upaya mengatasi korupsi

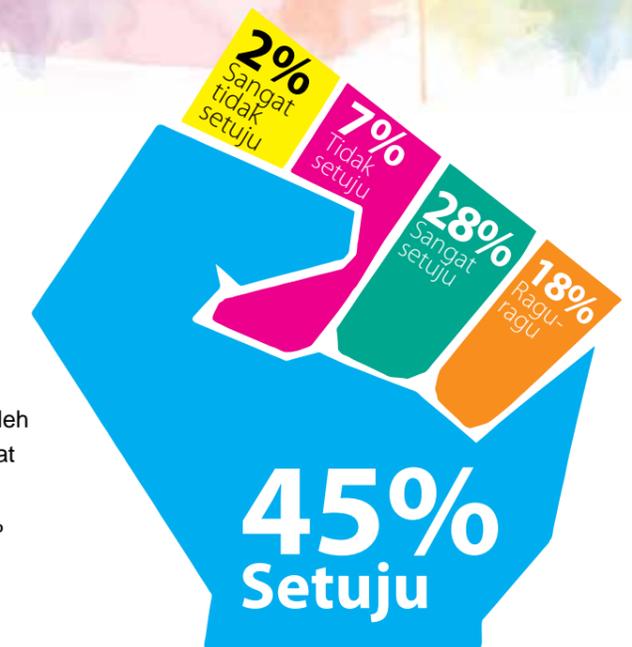
Pemerintah adalah pihak yang pertama dan yang utama jika membahas upaya mengatasi korupsi. Ia memiliki otoritas hukum untuk menindak. Lebih daripada itu, sektor publik sepenuhnya dikelola oleh aparat pemerintah atau setidaknya terikat pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah yang menetapkan kecakapan, integritas, prosedur, dan kode etik dalam mengelola sektor publik. Sehingga untuk mengatasi korupsi siftnya mulai dari pencegahan hingga penindakan. Berkaitan dengan efektivitas pemerintah dalam mengatasi korupsi, 40% responden menyatakan tidak setuju dan 14% menyatakan sangat tidak setuju jika dikatakan pemerintah sudah melakukan cara yang efektif dalam melawan korupsi (grafik 6). Gambaran ketidaksetujuan ini konsisten dengan ketidakpuasan responden terhadap upaya yang dilakukan pemerintah pada grafik 2 di atas.

Melawan korupsi tentu tidak cukup hanya dari peran pemerintah semata, perlu juga peran dari publik yang lebih luas. Lebih dari separuh responden memiliki keyakinan bahwa warga biasa dapat melakukan perlawanan terhadap korupsi (45% setuju, 28% sangat setuju) (Grafik 7).

Grafik 7

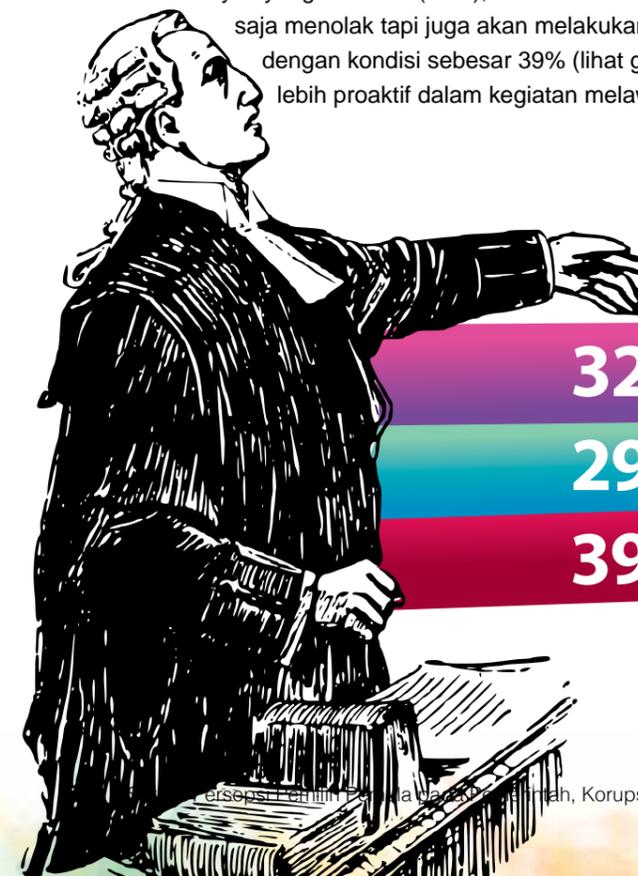
RAKYAT BIASA DAPAT MELAWAN KORUPSI

Lalu apakah warga biasa itu termasuk kelompok pemilih pemula muda? Dalam survei ini, separuh pemilih pemula muda tidak yakin akan peran mereka untuk membuat perubahan melawan praktik korupsi. Sikap itu didukung oleh 57% responden (lihat grafik 8, 46% setuju dan 11% sangat setuju terhadap pernyataan "suap dan berbuat curang. Pemilih pemula muda tidak bisa mengubahnya") dan 15% merasa ragu-ragu. Dengan demikian, hanya 28% pemilih pemula muda yang merasa optimis akan peran pemilih pemula muda dalam perubahan.



Grafik 8 Suap dan berbuat curang merupakan sesuatu yang biasa terjadi, dan pemilih pemula muda tidak bisa mengubahnya
11% Sangat Setuju, 46% Setuju, 15% Ragu-ragu, 24% Tidak Setuju, 4% Sangat Tidak Setuju

Pada umumnya suap dilakukan demi sesuatu hal yang dapat memberi manfaat bagi si pelaku. Manfaat itu dapat berupa prosedur yang menjadi lebih cepat atau malah melanggar sejumlah aturan yang ditetapkan. Suap juga dapat berarti menghindarkan diri dari hukuman yang tidak dikehendaki. Berdasarkan pemahaman ini, sikap responden lebih banyak yang menolak (61%), terdiri dari 29% responden yang menolak memberikan imbalan dan 32% tidak saja menolak tapi juga akan melakukan pelaporan; sementara yang menyatakan akan berkompromi sesuai dengan kondisi sebesar 39% (lihat grafik 9). Melakukan pelaporan merupakan langkah yang bersifat lebih proaktif dalam kegiatan melawan korupsi.



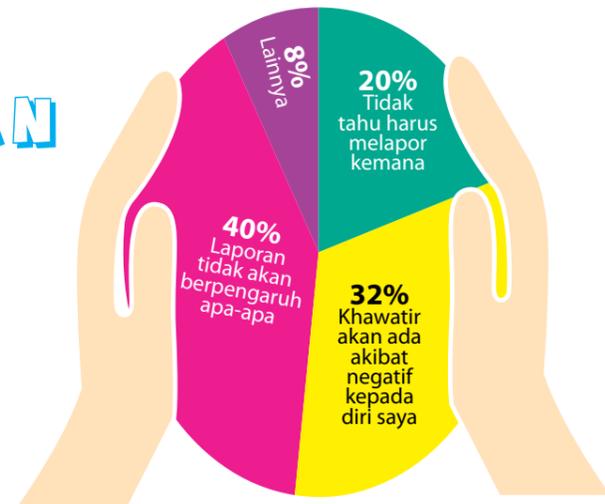
Grafik 9 Jika ada petugas yang meminta imbalan supaya urusan kamu menjadi lebih mudah atau kamu jadi terhindar dari suatu denda/hukuman tertentu, maka kamu akan:



Ada sejumlah alasan mengapa seseorang tidak melaporkan kasus suap. Diantara alasan tersebut yang paling banyak dipilih adalah laporan mereka tidak akan memberi pengaruh apa-apa (40%), sebagian besar lagi mengatakan bahwa ada konsekuensi negatif bagi diri mereka jika melakukan pelaporan (32%), dan 20% menyatakan tidak tahu harus melapor ke mana (lihat grafik 10). Dua pilihan jawaban terbesar mengindikasikan lemahnya penegakkan hukum. Bahwa responden secara implisit menggambarkan adanya kemungkinan tidak adanya konsekuensi bagi pelaku tetapi dapat pula bercerita bahwa tidak akan ada efek jera yang membuat perilaku yang dilaporkan akan berhenti.

GRAFIK 10

ALASAN KAMU TIDAK MELAKUKAN PELAPORAN



Partisipasi aktif warga tentunya sangat diperlukan dalam upaya melawan korupsi. Selain peran secara individual dengan mempertahankan integritas atau norma etis pada diri sendiri, perlu juga keterlibatan secara aktif dalam gerakan antikorupsi. Kepada responden diajukan beberapa pilihan mulai dari yang terlibat secara aktif, misalnya ikut dalam aksi sampai dengan relatif pasif seperti donasi. Pilihan terbanyak adalah ikut menyebarkan isu antikorupsi melalui media sosial (29%) dan bergabung dalam organisasi antikorupsi (29%), ada juga yang bersedia terlibat dalam aksi protes damai (23%) atau menandatangani petisi (13%). Sedangkan memberi donasi dipilih oleh 6% responden (lihat grafik 11).

GRAFIK 11

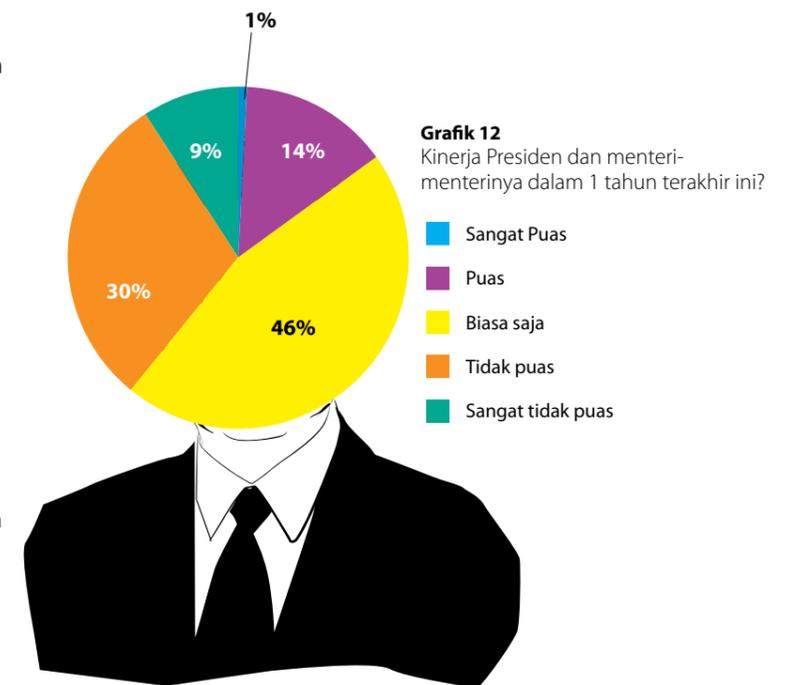
Peran melawan korupsi



KINERJA PEMERINTAH

Kepuasan terhadap Pemerintah

Evaluasi terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan menyikapi kinerja presiden dan kabinet hingga jajaran di bawahnya. Dalam sistem demokratis, pemerintah berasal dari pilihan warga negara dan ada untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi publik. Apapun kinerja dari pemerintah, baik atau buruk, akan berdampak pada publik secara luas. Responden diminta untuk menilai apakah mereka puas dengan kerja pemerintah dalam setahun terakhir. Ada 46% responden yang menyatakan tidak ada perubahan yang berarti atau biasa saja. Mereka yang berada pada bagian tidak puas dan sangat tidak puas (38%) jumlahnya lebih besar dari mereka yang menyatakan puas dan sangat puas (16%) (lihat grafik 12).

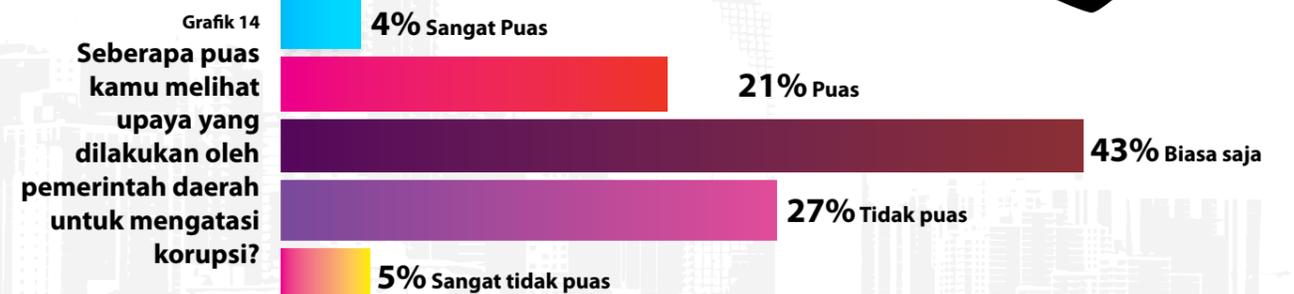
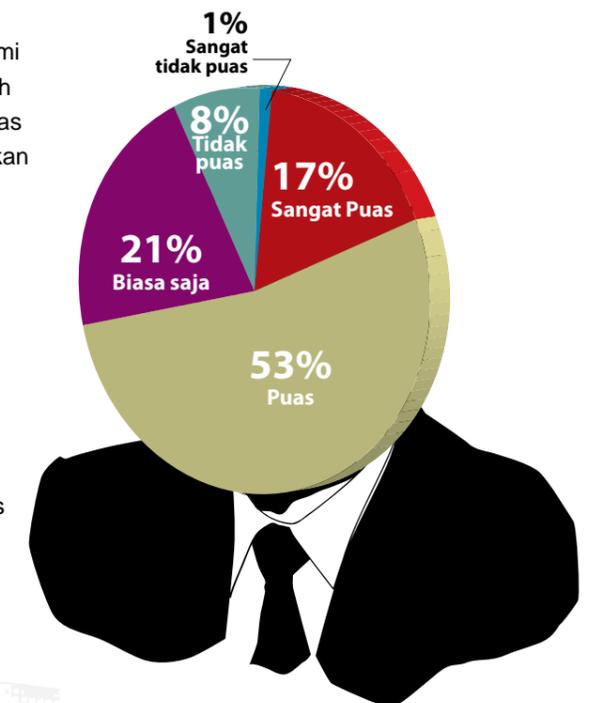


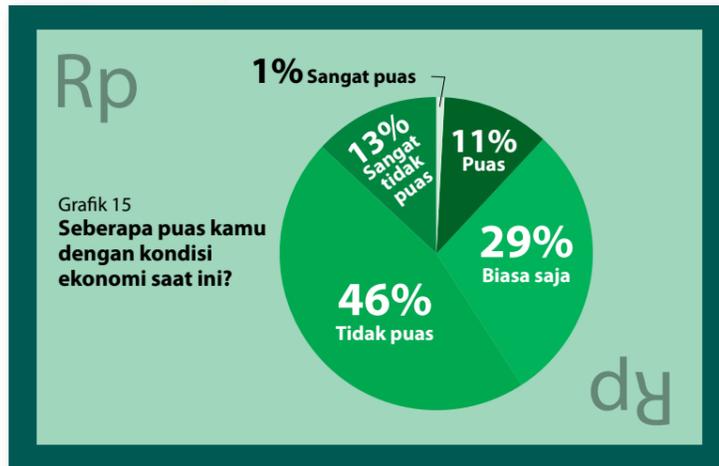
Kerja dari pemerintah daerah tentunya lebih dapat dirasakan langsung oleh warga. Lewat otonomi daerah, kepala daerah memiliki keluasaan wewenang dalam mengatur birokrasi dan mengalokasikan sumber daya demi kebaikan daerahnya. Responden survei yang kesemuanya adalah warga DKI Jakarta, 70% menyatakan puas (53%) dan sangat puas (17%) dengan kinerja kepala daerah DKI Jakarta, 21% menyatakan biasa saja dan 9% yang menyatakan tidak puas.

GRAFIK 13

Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 1 tahun belakangan ini?

Adapun berkaitan dengan upaya mengatasi korupsi di daerah, 32% responden menyatakan belum puas, 26% menyatakan puas dan 43% menyatakan biasa saja. Mayoritas responden belum merasakan suatu kondisi bersih dan tidak korup selama setahun terakhir di wilayah DKI Jakarta.



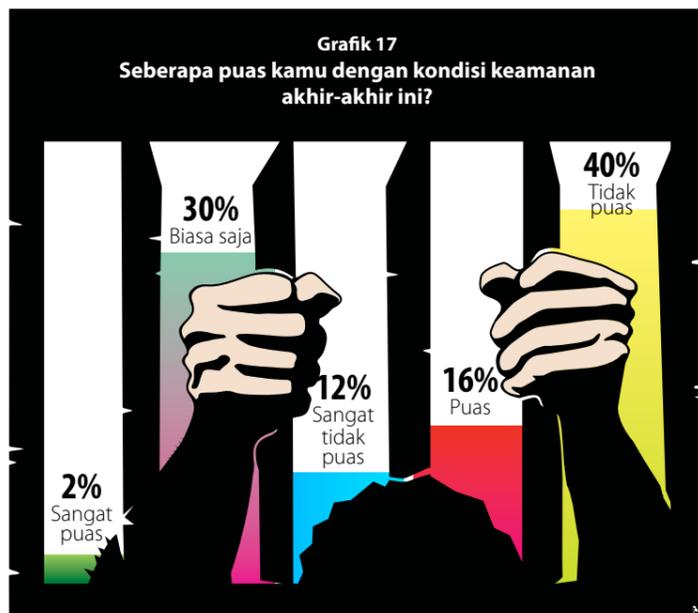
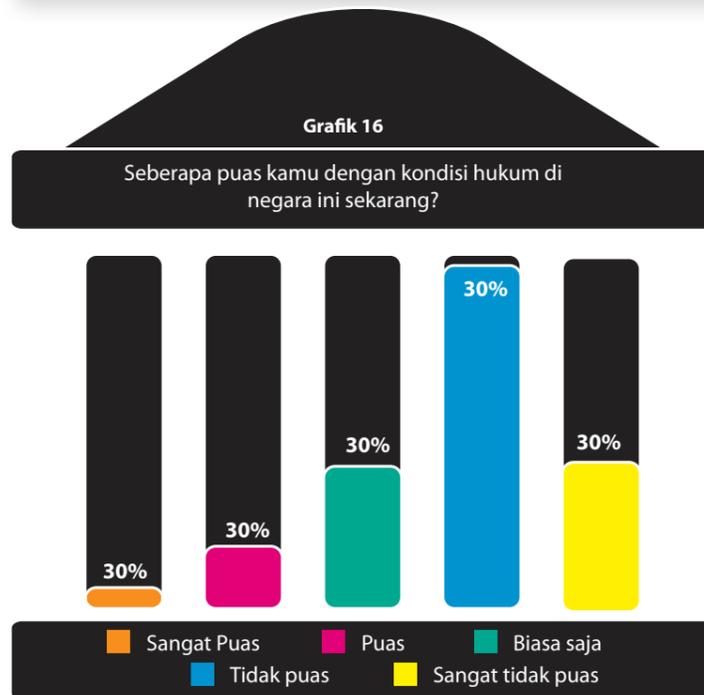


Kepuasan terhadap kondisi ekonomi, hukum dan keamanan

Kepuasan terhadap pemerintahan berkaitan dengan kondisi ekonomi, rasa keadilan dan juga ketertiban/keamanan. 69% responden merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi belakangan ini, 29% merasa tidak ada perubahan yang berarti, dan ada 12% responden yang merasa puas (lihat grafik 15).

Tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi, untuk kondisi hukum 69% menyatakan tidak puas & sangat tidak puas; 20% menyatakan biasa saja dan 10% yang menyatakan puas & sangat puas (lihat grafik 16).

Begitu pula halnya dengan aspek keamanan, 52% merasa tidak puas, 30% menyatakan biasa saja dan 18% yang menyatakan puas dengan kondisi keamanan akhir-akhir ini.



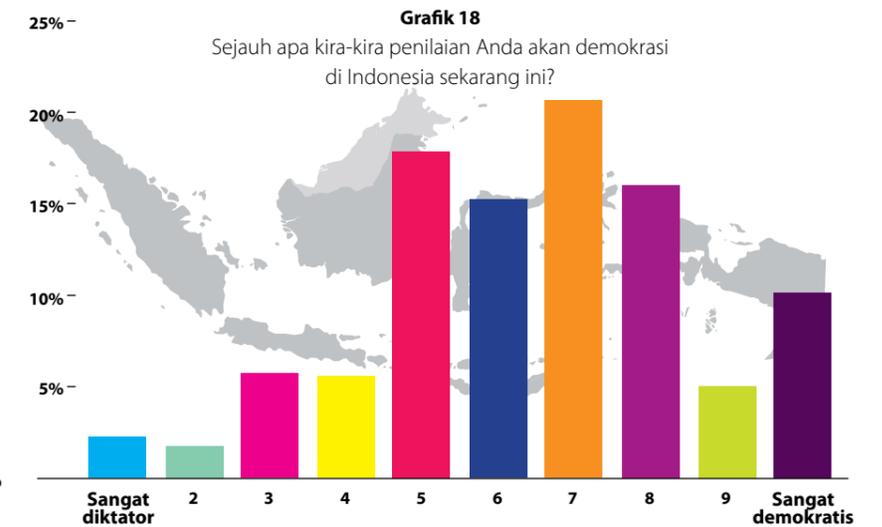
PEMILIH PEMULA MUDA, POLITIK DAN DEMOKRASI

Demokrasi merupakan istilah yang dikenal luas hampir oleh semua orang dewasa. Namun saat ditanya apakah sesungguhnya demokrasi itu, maka beragam jawaban akan mengemuka, bahkan bisa bertentangan antara satu dengan lainnya. Setiap orang bisa jadi memiliki jawabannya sendiri atas apa yang menurutnya gambaran paling tepat mengenai demokrasi. David Beetham merumuskan demokrasi dengan cara yang sederhana, yakni "sebagai sebuah prosedur pengambilan keputusan pada setiap kelompok atau masyarakat, di mana setiap anggota kelompok atau masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan menjadikan pandangan mereka sebagai sesuatu yang dipertimbangkan" (Beetham, 2006: 2). Pengambilan keputusan ini diwujudkan melalui bentuk perwakilan dan sistem *check and balances* dalam sistem politik di Indonesia.

Jadi, sederhananya demokrasi secara umum dipahami sebagai bentuk pengambilan keputusan kolektif yang ada dalam demokrasi didasarkan pada prinsip bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berdampak atas diri mereka. Dalam artian demokrasi inilah yang dijadikan rujukan bagi para responden untuk memberikan penilaiannya terhadap demokrasi, kemudian kaitannya dengan Pemilu 2014.

Kondisi Demokrasi di Indonesia

Dalam grafik berikut responden diberikan semacam skala visual untuk memberikan penilaian ada di posisi mana praktik berdemokrasi di Indonesia dalam rentang skala 1-10. Skor 1-5 adalah rentang penilaian untuk sistem dictator, rentang 6-10 adalah penilaian untuk sistem yang dianggap demokratis. Dari hasil survei ada 67% responden yang menilai Indonesia berada di jalur demokrasi, yang memilih skala 6-10 dari penilaian. Ada 33% responden yang menilai Indonesia tidak berada di jalur demokrasi dengan memilih skala 1-5 dari pertanyaan yang diajukan (lihat grafik 18).



Kepercayaan akan Sistem Demokrasi

Berdasarkan skala visual yang menunjukkan bahwa 67% responden Indonesia berada di jalur demokrasi, saat diajukan pertanyaan apakah demokrasi dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami Indonesia, 64% dari seluruh responden percaya bahwa demokrasi dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia, sedangkan 36% responden tidak memiliki kepercayaan bahwa sistem demokrasi mampu melakukannya.

Grafik 19 Seberapa puas kamu dengan kondisi hukum di negara ini sekarang?

64% dari seluruh responden percaya bahwa demokrasi dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia

36% responden tidak memiliki kepercayaan bahwa sistem demokrasi mampu melakukannya.

Namun, meskipun banyak responden yang percaya kepada sistem demokrasi, tidak sedikit dari mereka yang menilai bahwa sistem demokrasi tidak memberikan dampak berarti kepada diri mereka. Ada 45% persen responden yang memandang bahwa pemerintah demokratis atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Ada pesimisme dalam menilai demokrasi di Indonesia. Sebanyak 31% responden percaya bahwa demokrasi selalu lebih baik dibandingkan pemerintahan apapun, sedangkan 24% responden percaya bahwa dalam keadaan tertentu pemerintahan yang otoriter lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan yang demokratis.

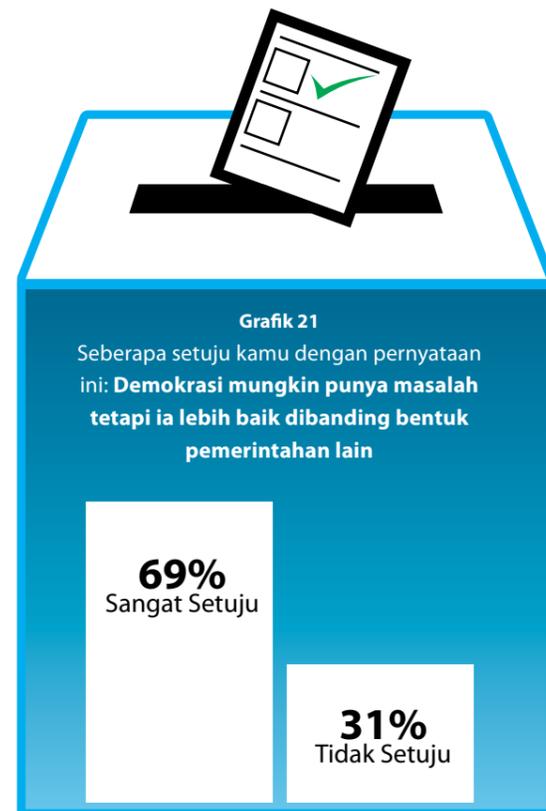
Pesimisme sedemikian muncul dalam FGD yakni tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dan menilai pemerintah tidak akan sanggup mengatasi korupsi karena di dalam tubuh pemerintah sendiri tersangkut banyak kasus korupsi. Sikap permisif terhadap perilaku curang (misal menyuap) muncul karena menilai sistem yang ada tidak akan memberikan jalan keluar bagi penyelesaian kasus yang mereka alami (misal tilang), bahkan sistem hukum justru menjerat dan menyebabkan keruwetan. Namun, para informan dalam FGD memerlukan pemilu untuk menentukan pemimpin, dan agar demokrasi bisa berjalan. Di lain sisi, informan juga mengafirmasi kurangnya pendidikan politik oleh partai politik mengenai seperti apa sistem berdemokrasi dan mengapa warga harus aktif memperjuangkan hak-hak dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakatnya.

Grafik 20
Manakah dari pernyataan di bawah yang paling sesuai dengan pendapat Anda



Korupsi yang meluas juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa ada kebutuhan pemerintahan otoriter dalam suatu kondisi tertentu yang diharapkan mampu melakukan penertiban dan pemberesan permasalahan secara cepat dan efektif. FGD mengafirmasi keengganan partisipasi politik di kalangan responden karena masih menilai politik sebagai sesuatu yang kotor, politik bukan diselenggarakan untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan untuk semata-mata mendapatkan kekuasaan, dan saat semakin kuat maka tidak ada lagi pengawasan yang memadai terhadap penggunaan kekuasaan.

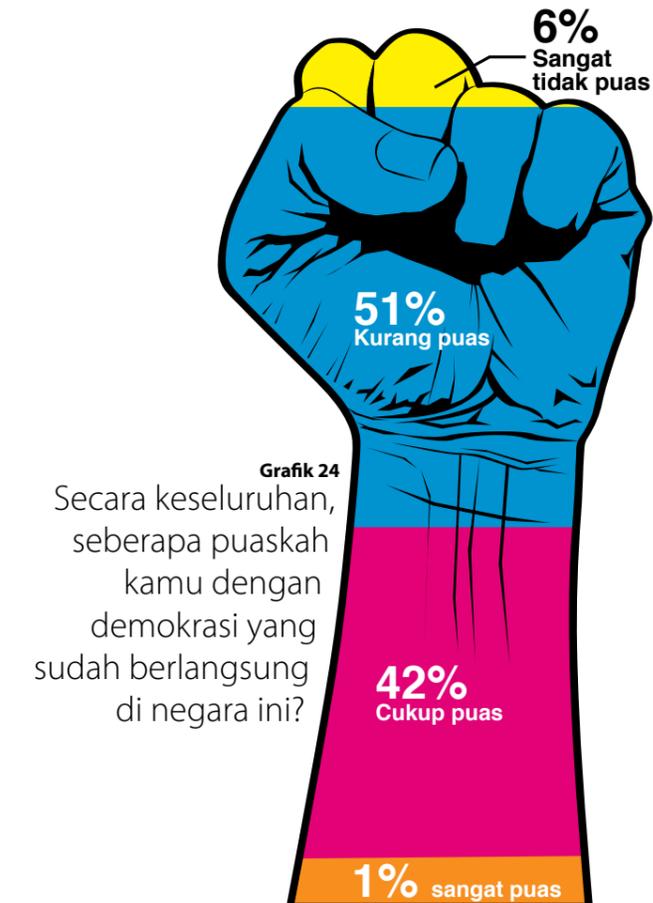
Meski terdapat rasa pesimis yang tinggi terhadap sistem demokrasi terhadap diri mereka, dan masalah-masalah yang muncul di dalam sistem demokrasi, tingkat kepercayaan bahwa demokrasi masih merupakan pilihan sistem yang lebih baik dibandingkan sistem pemerintahan lain, disetujui oleh 69% responden, sedangkan 31% reseponden lainnya tidak setuju.



Demikian juga saat diajukan pertanyaan seberapa penting sistem demokrasi, 85% responden menjawab penting, sedangkan 15% menilai tidak penting.



Selain diajukan pertanyaan seberapa pentingnya demokrasi, responden diberikan pertanyaan mengenai seberapa pentingnya ekonomi menurut mereka. Ada 98% responden yang menilai ekonomi penting dan 2% yang menilai ekonomi tidak penting. Ada korelasi yang bisa dilihat bahwa kebutuhan akan demokrasi berbanding lurus dengan kebutuhan akan kesejahteraan. Jadi ada pemahaman bahwa sistem demokrasi yang baik akan mampu membawa kepada kesejahteraan.



Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi, tidak diikuti dengan tingkat kepuasan terhadap demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini. **Hanya 1% yang merasa sangat puas dengan demokrasi di Indonesia saat ini**, 42% merasa cukup puas, 51% merasa kurang puas dan 6% merasa sangat tidak puas (lihat grafik 24).

ANAK MUDA SEBAGAI PEMILIH PEMULA MUDA PEMILU 2014



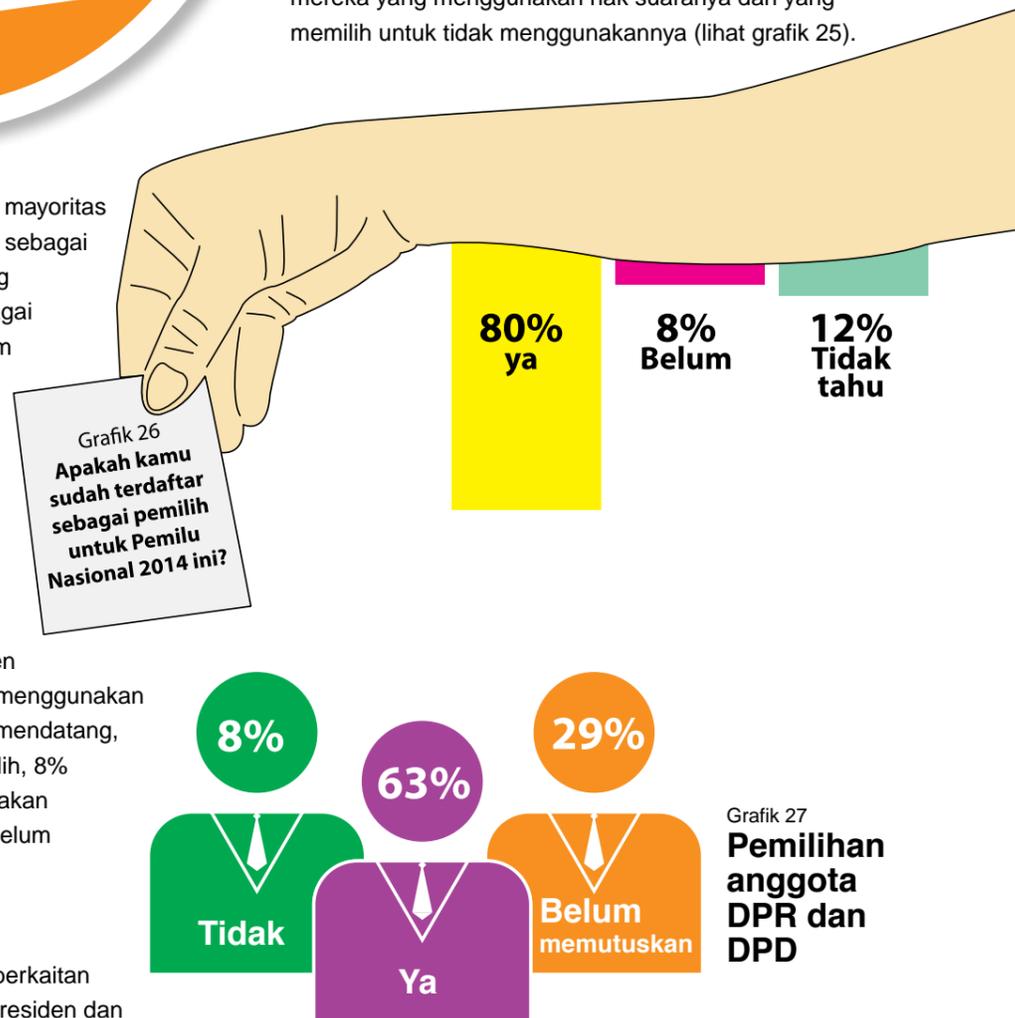
Partisipan dari survei ini adalah pemilih pemula muda. Artinya mereka baru akan pertama kalinya mengikuti Pemilu. Pemilu yang dimaksud adalah pemilihan wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden yang berlangsung secara nasional. Pemilihan kepala daerah tidak termasuk sebagai Pemilu. Meskipun demikian ia dapat memberi sedikit gambaran akan proses pemberian suara dan suasana kampanye. Dari 933 orang responden, 46% mengaku menggunakan hak suaranya sebagai warga DKI Jakarta pada Pemilu pada DKI Jakarta tahun 2012; 39% responden tidak menggunakan hak suaranya karena memang belum cukup usia pada tahun 2012. Sementara itu ada 6% yang memilih tidak menggunakan hak suaranya dan 7% tidak terdaftar sebagai pemilih. Gambaran ini menunjukkan proporsi yang sangat signifikan antara mereka yang menggunakan hak suaranya dan yang memilih untuk tidak menggunakannya (lihat grafik 25).

Menjelang Pemilu 2014 tahun ini, mayoritas responden mengetahui statusnya sebagai pemilih. Ada 80% responden yang menyatakan sudah terdaftar sebagai pemilih, ada 8% yang sadar belum terdaftar sebagai pemilih dan 12% menyatakan tidak tahu status dirinya (lihat grafik 26).

Intensi menggunakan hak suara

Pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD akan dilangsungkan terlebih dahulu. Kepada responden ditanyakan intensi mereka untuk menggunakan hak suara mereka dalam Pemilu mendatang, 63% menyatakan akan ikut memilih, 8% menyatakan tidak akan menggunakan suaranya dan 29% menyatakan belum memutuskan (lihat grafik 27).

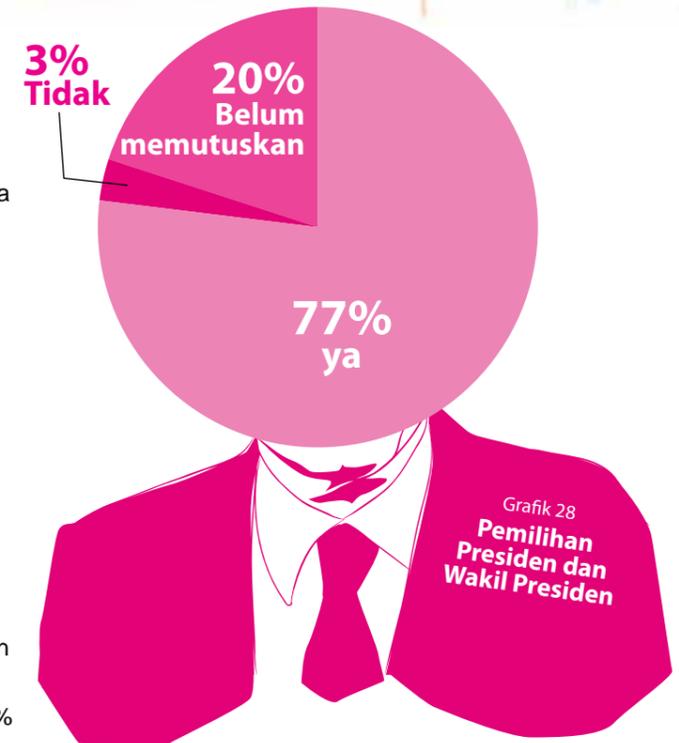
Pertanyaan yang sama diajukan berkaitan dengan Pemilu pasangan calon presiden dan wakil. 77% para pemilih pemula muda di DKI Jakarta menyatakan akan menggunakan hak pilihnya, sementara 3% menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya, dan ada 20% yang menyatakan masih belum memutuskan apakah akan menggunakan suaranya atau tidak



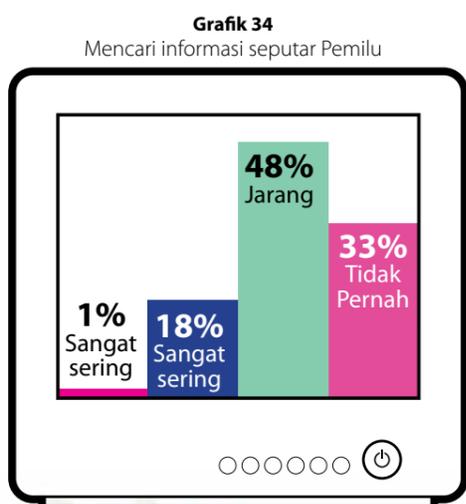
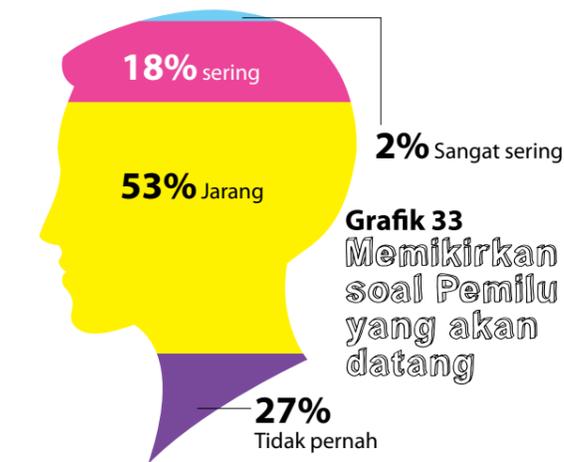
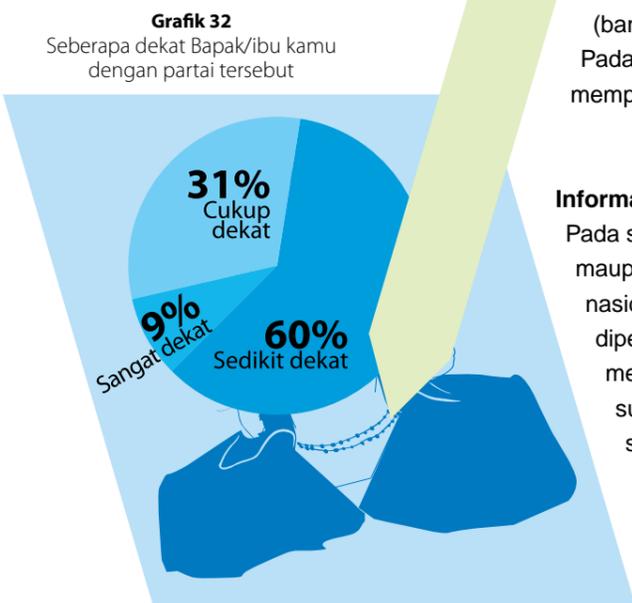
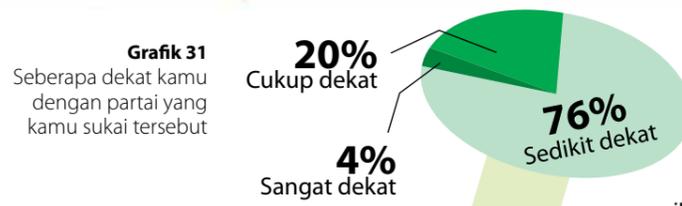
(lihat grafik 28). Persentase ini jika dibandingkan dengan intensi memilih pada Pemilu legislatif, maka responden tampaknya akan lebih berpotensi untuk berpartisipasi pada Pemilu Presiden dan wakil. Mereka yang belum memutuskan berpotensi untuk menjadi "golput" atau suara pemilih mengambang pada Pemilu 2014 nanti.

Identitas Politik

Afiliasi atau kedekatan pada satu partai politik tertentu merupakan identitas politik seseorang. Hasil survei menunjukkan bahwa di DKI Jakarta identitas politik tidak direpresentasikan oleh pilihan partai politik. Lebih dari separuh responden memiliki ketertarikan pada suatu partai politik, tapi kurang dari 30% yang berada cukup atau sangat dekat dengan partai politik yang mereka sukai itu. Saat ditanyakan apakah responden menyukai satu partai politik tertentu dari partai-partai yang akan mengikuti Pemilu nanti, maka 34% responden menyatakan tidak suka pada partai politik yang ada, 15% menyatakan suka dengan PDI Perjuangan, masing-masing sebesar 8% menyukai Gerindra dan Partai Demokrat, 7% menyukai Hanura dan 6% menyatakan rahasia (lihat grafik 29).



Dari mereka yang menjawab menyukai satu partai tertentu, ada 4% yang menyatakan sangat dekat akan partai yang disukainya itu, 20% menyatakan cukup dekat dan 76% menyatakan sedikit dekat (lihat grafik 30). Berarti hanya 4% dari responden yang identitas politiknya terkait dengan satu partai. Mereka yang sedikit dekat mudah untuk berpindah ke partai lain.



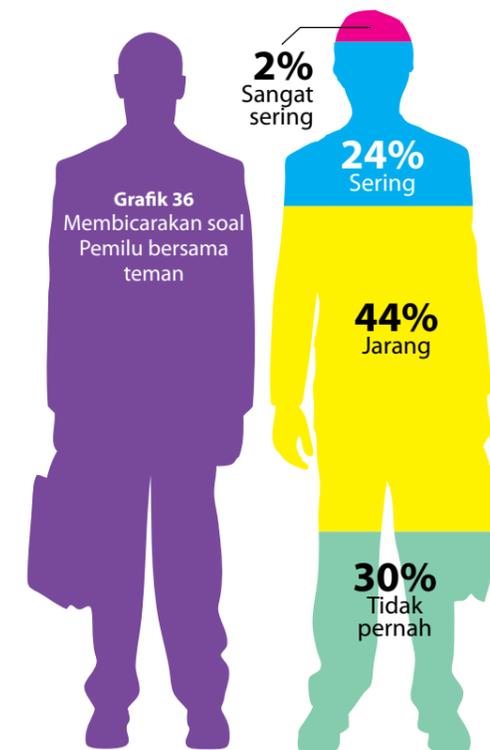
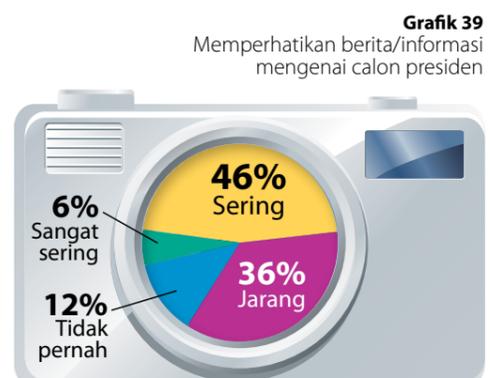
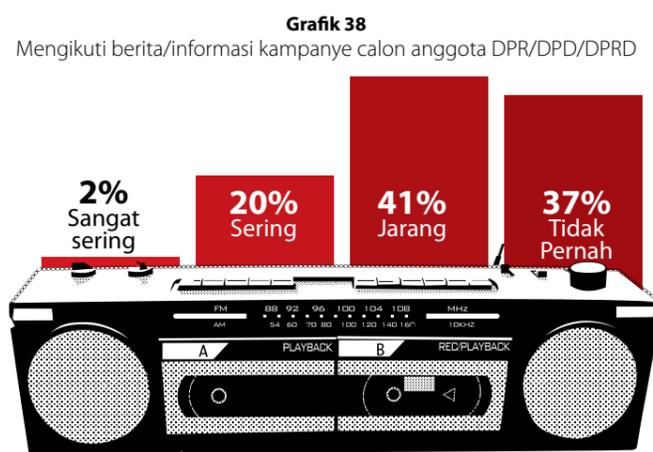
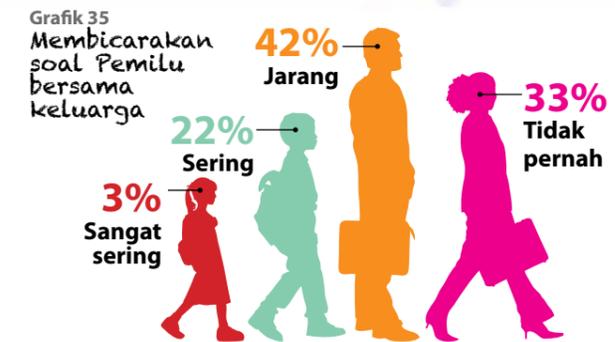
Tampaknya ada kedekatan antara kedekatan politik orang tua dengan anak. Pertanyaan yang sama diajukan kepada responden hanya kali ini mengacu pada afiliasi politik orang tua mereka. Tingkat persentase pilihan orang tua relatif sama dengan pola pilihan para pemilih pemula muda dalam survei ini (bandingkan grafik 29 dengan 30; dan grafik 31 dengan 32). Pada bagian survei yang berikutnya diketahui bahwa orang tua mempengaruhi pilihan politik responden sebagai pemilih pemula.

Informasi menjelang Pemilu 2014

Pada saat Pemilu setiap suara diperhitungkan sama, baik pemula maupun mereka yang sudah berkali-kali mengikuti pemilu nasional. Hak suara perlu digunakan sebaik-baiknya, untuk itu diperlukan bekal informasi yang cukup agar sebuah keputusan memilih dihasilkan oleh pertimbangan yang matang. Saat survei dilakukan Pemilu Legislatif kurang lebih tinggal dari satu bulan lagi. Kepada responden ditanyakan sejumlah hal yang relevan dengan upaya mencukupi diri dengan informasi politik atau Pemilu.

Dari sejumlah aktivitas yang diajukan kepada responden dapat disimpulkan bahwa para pemilih pemula muda DKI Jakarta tidak secara khusus meluangkan diri untuk menggali informasi yang dapat membantu mereka dalam memberikan suara politiknya. Mereka cenderung jarang mencari atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan partai politik, tokoh politik juga proses menjelang Pemilu 2014.

- Menjelang Pemilu 2014 di bulan April, separuh dari responden pemilih pemula mengatakan jarang (53%) memikirkan soal Pemilu yang akan datang, seperempatnya malah mengatakan tidak pernah (27%) (lihat grafik 33)
- Jika menjelang Pemilu responden cenderung tidak memikirkannya, maka wajar jika tingkat kemauan untuk mencari informasi mengenai pemilu juga rendah. Mayoritas responden mengaku jarang mencari informasi seputar pemilu (48%) dan 33% menyatakan tidak pernah. Kurang dari 20% responden secara intens mencari informasi (lihat grafik 34).
- Mereka juga jarang membicarakan tentang pemilu, baik bersama keluarga (42%) ataupun dengan teman (44%). Sekitar 30% tidak pernah membicarakannya di kedua lingkungan sosial itu. Hanya seperempat dari responden yang relatif sering membicarakannya (lihat grafik 35 dan 36).



- Responden sebagian besar jarang mengikuti berita-berita mengenai partai politik (41%) dan 17% mengaku tidak pernah. Meskipun demikian persentase mereka yang sering mengikuti berita mengenai partai politik (kurang lebih 43%) relatif lebih banyak dibanding aktivitas pencarian informasi pemilu lainnya (lihat grafik 37)
- Secara spesifik para pemilih akan memilih figur-figur calon anggota legislatif di tingkat pusat dan provinsi. Akan hal ini, 37% responden mengaku tidak pernah mengikuti berita kampanye calon anggota legislatif, 41% menyatakan jarang, dan ada 22% yang menyatakan sering dan sangat sering (lihat grafik 38).
- Perhatian para pemilih pemula di DKI Jakarta lebih banyak tertuju kepada informasi seputar calon presiden dan wakil. Berbeda dengan aktivitas informasi pemilu lainnya, persentase mereka yang sering memperhatikan informasi capres (46%) lebih banyak dari mereka yang menyatakan jarang (36%)

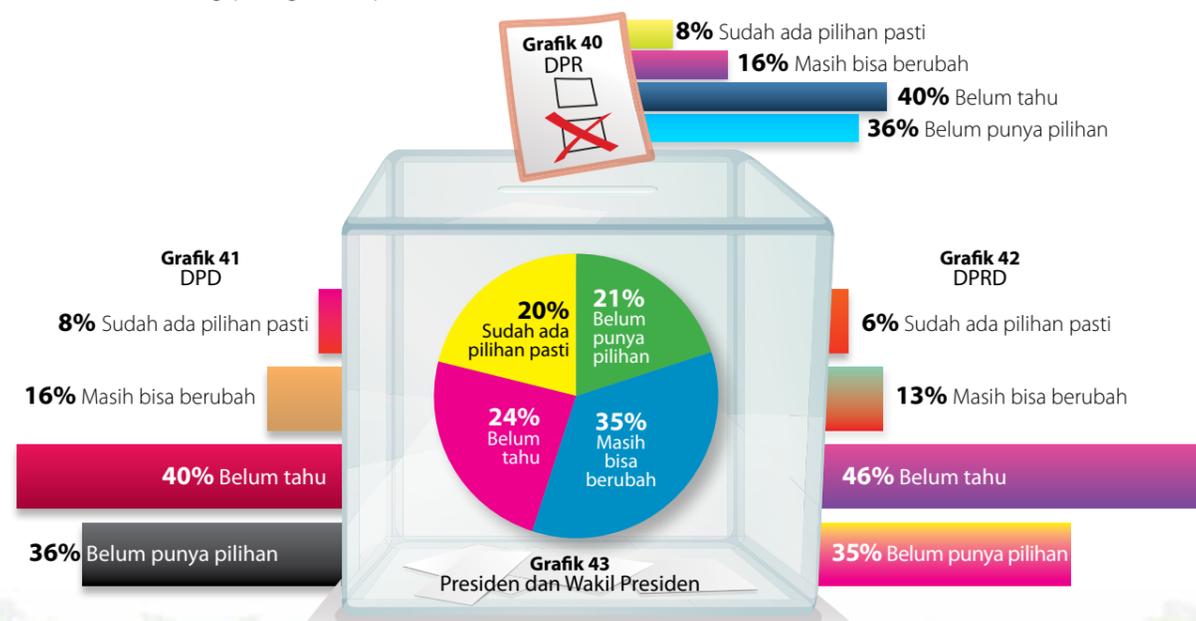
Pilihan Politik

KPU sudah menetapkan ribuan nama yang akan menjadi calon anggota legislatif (caleg), baik untuk DPR, DPRD dan DPD. Jika diperkecil ke daerah pilihan (dapil) maka akan ditemukan puluhan dan mungkin ratusan nama yang dapat dipilih. Banyak caleg yang sudah mengkampanyekan diri mereka melalui iklan, selebaran, poster dan spanduk. Adapun bakal calon presiden dan wakil belum ditetapkan oleh KPU. Akan tetapi sejumlah tokoh politik sudah menyatakan dirinya dan ada pula yang sudah diusung oleh kelompok masyarakat.

Mengingat situasi ini, kepada responden ditanyakan soal sejauh apa mereka sudah memutuskan pilihan mereka terhadap para caleg dan figur-figur yang diusung menjadi capres. Responden yang sudah mempunyai pilihan figur dapat memilih "sudah ada pilihan pasti" akan tetapi jika pilihan itu ada kemungkinan berubah maka pilihannya adalah "masih bisa berubah". Mereka yang sudah memiliki calon pilihan dapat memilih pilihan "ada pilihan pasti" atau "masih bisa berubah". Mereka yang sudah memperhatikan tapi belum menetapkan pilihan memilih "belum tahu". Sementara mereka yang memilih "belum tahu" adalah mereka yang sama sekali tidak menaruh perhatiannya akan kehadiran figur politisi yang akan dipilih pada Pemilu Nasional 2014.

Melihat presentase pilihan jawaban yang diberikan, pemilih pemula muda DKI Jakarta belum menetapkan pilihan politiknya pada figur calon legislatif yang ada dan juga pada mereka yang berpotensi menjadi kandidat calon presiden dan wakil.. Sementara itu para pemilih pemula muda cenderung lebih menaruh perhatian pada figur kandidat calon presiden dan wakil daripada calon anggota legislatif.

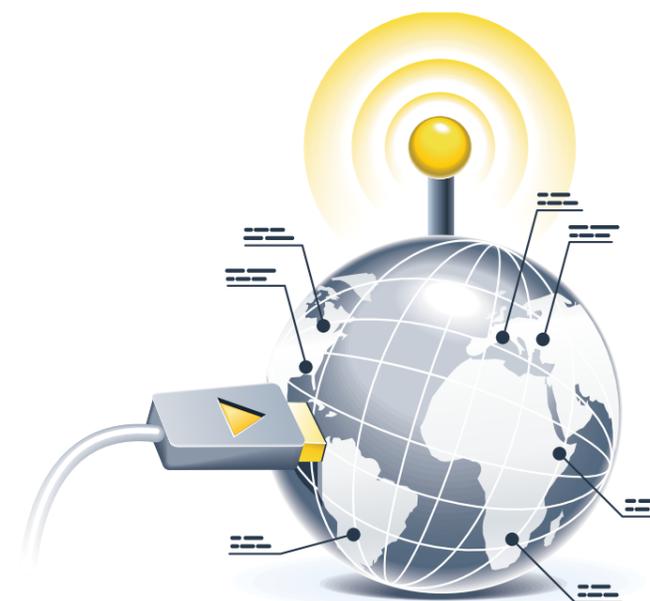
- Hampir 60% dari responden dapat mengubah pilihannya menjelang Pemilu. Ada 16% yang sudah punya pilihan tapi masih dapat berganti, 40% masih belum menentukan pilihan dan 36% sama sekali belum memperhatikan pilihan-pilihan caleg yang sudah terdaftar di KPU (lihat grafik 40)
- Keadaan yang sama juga berlaku terhadap pilihan calon anggota DPD. Hanya 3% yang menyatakan punya pilihan pasti, 12% dapat berubah, 49% belum menentukan pilihan dan 36% belum memperhatikan pilihan yang tersedia.
- Proporsi persentase pilihan juga tidak jauh berbeda saat ditanyakan mengenai pilihan terhadap calon anggota DPRD. Mayoritas belum menentukan siapa yang layak menjadi kandidat pilihan mereka (79% dari mereka yang belum tahu dan belum punya pilihan) (lihat grafik 42)
- Persentase responden berubah ketika ditanyakan soal pilihan kandidat calon presiden dan wakil. 55% responden sudah memiliki figur yang diharapkan akan maju menjadi calon presiden dan wakil, 20% diantaranya sudah memastikan pilihannya dan 35% lainnya sudah memiliki pilihan meski masih bisa berubah. Sebanyak 24% masih belum menentukan pilihan dan 21% belum memperhatikan potensi kandidat calon presiden mendatang (lihat grafik 43).



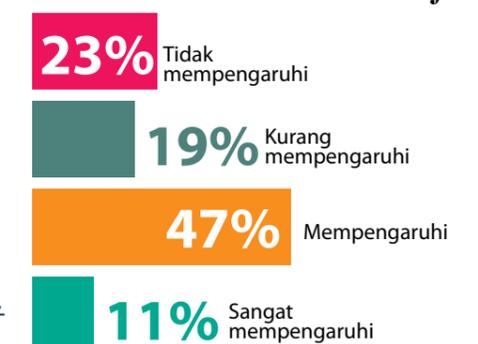
Pengaruh dalam menentukan pilihan

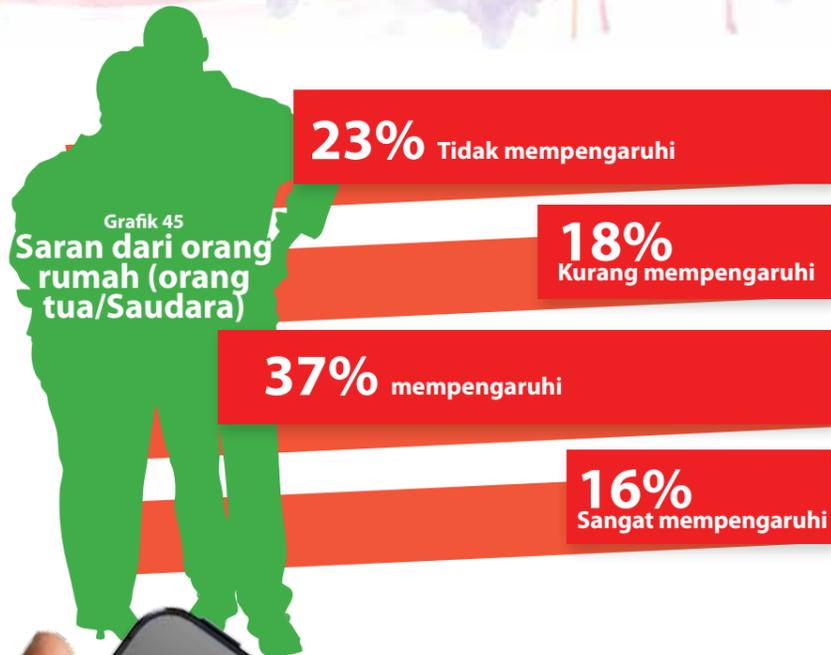
Mayoritas pemilih pemula muda di DKI Jakarta belum menentukan siapa kandidat yang akan dipilih nantinya. Kepada mereka ditanyakan sejumlah hal yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan hak suaranya.

- Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada faktor dominan yang mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan menjelang pemilu. Meskipun demikian ada beberapa faktor yang dipilih oleh lebih banyak responden daripada faktor lainnya, yang dianggap dapat mempengaruhi pilihan responden.
- Berita positif atau negatif yang berkaitan dengan pemilu, partai politik atau tokoh politik paling banyak dipilih sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan memilih responden. Faktor ini dipilih oleh 58% (47% mempengaruhi, 11% sangat mempengaruhi) (lihat grafik 44).
- Faktor yang kedua yang banyak dipilih oleh responden adalah pengaruh dari orang tua. Ada 53% responden yang menyatakan dapat dipengaruhi oleh faktor ini (37% mempengaruhi, 16% sangat mempengaruhi, lihat grafik 45).
- Perbincangan di media sosial (grafik 46) dan hasil-hasil survei (grafik 47) mengenai siapa yang diunggulkan tidak menjadi faktor yang banyak dipilih oleh responden, kurang dari 50% yang menganggap kedua hal itu akan mempengaruhi mereka.
- Lingkungan sosial di luar rumah ternyata juga bukan faktor yang dipilih oleh responden sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, pilihan teman-teman (grafik 48) dan perbincangan tetangga (grafik 55)
- Otoritas sosial juga tidak dianggap cukup mempengaruhi pilihan mereka, seperti himbaun guru (grafik 50), anjuran tokoh agama (grafik 50) dan arahan dari pejabat kelurahan/RT/RW (grafik 52).
- Janji-janji kampanye (grafik 49), imbalan materi (grafik 51), apalagi ancaman dari simpatisan (grafik 54) bagi pemilih pemula di DKI Jakarta, kecil perannya untuk mempengaruhi pilihan mereka.



Grafik 44
Berita positif atau negatif di media massa (tv, radio, berita online, koran, majalah)





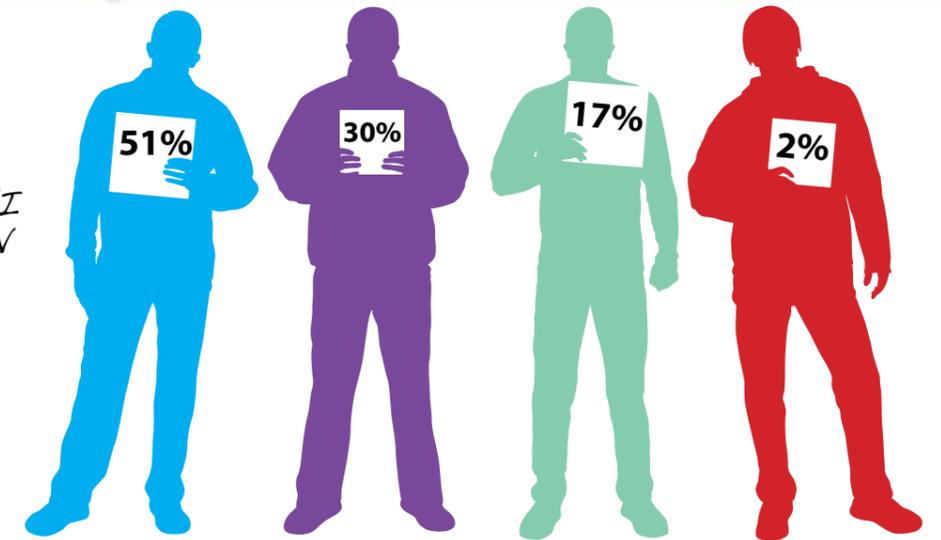
Grafik 46
PERBINCANGAN DI MEDIA SOSIAL

- Tidak mempengaruhi
- Kurang mempengaruhi
- Mempengaruhi
- Sangat mempengaruhi



- Tidak mempengaruhi
- Mempengaruhi
- Kurang mempengaruhi
- Sangat mempengaruhi

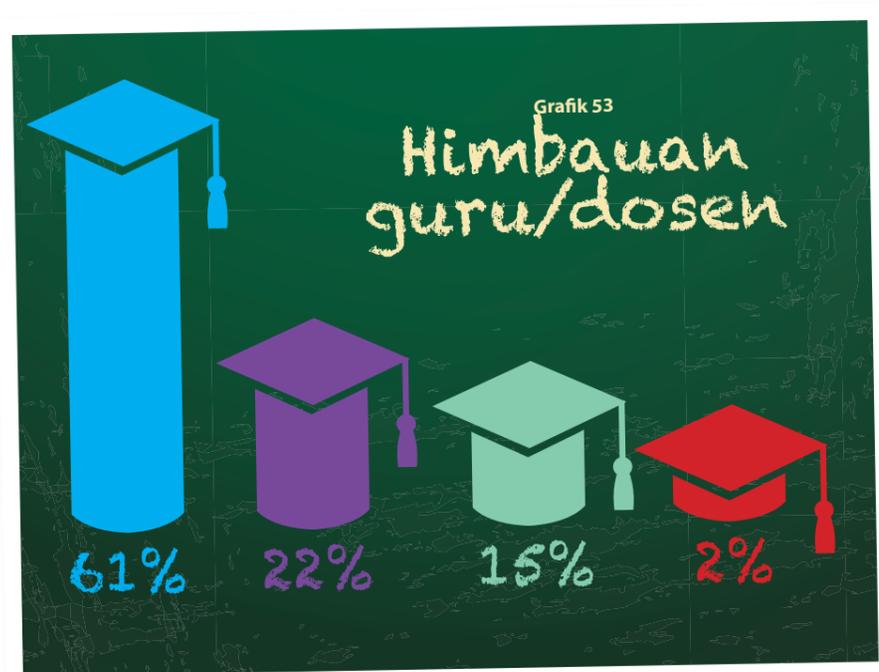
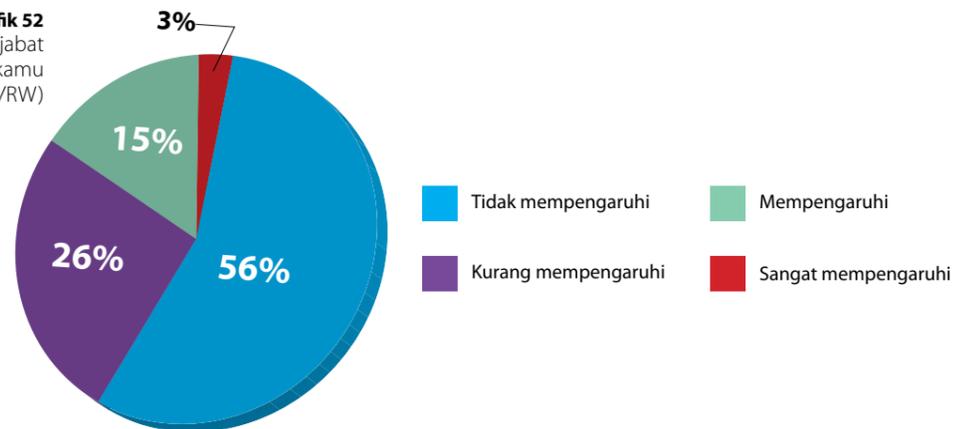
Grafik 48
PILIHAN DARI TEMAN-TEMAN



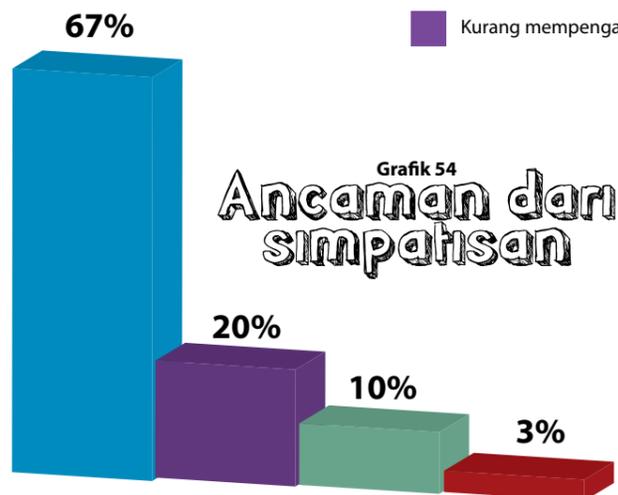
- Tidak mempengaruhi
- Mempengaruhi
- Kurang mempengaruhi
- Sangat mempengaruhi



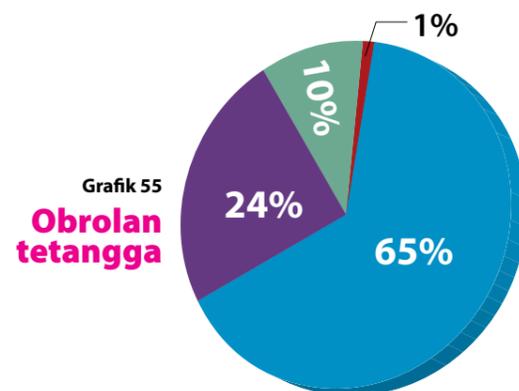
Grafik 52
Arahan dari pejabat di lingkungan kamu (Lurah/RT/RW)



■ Tidak mempengaruhi ■ Mempengaruhi
■ Kurang mempengaruhi ■ Sangat mempengaruhi



Grafik 54
Ancaman dari simpatisan

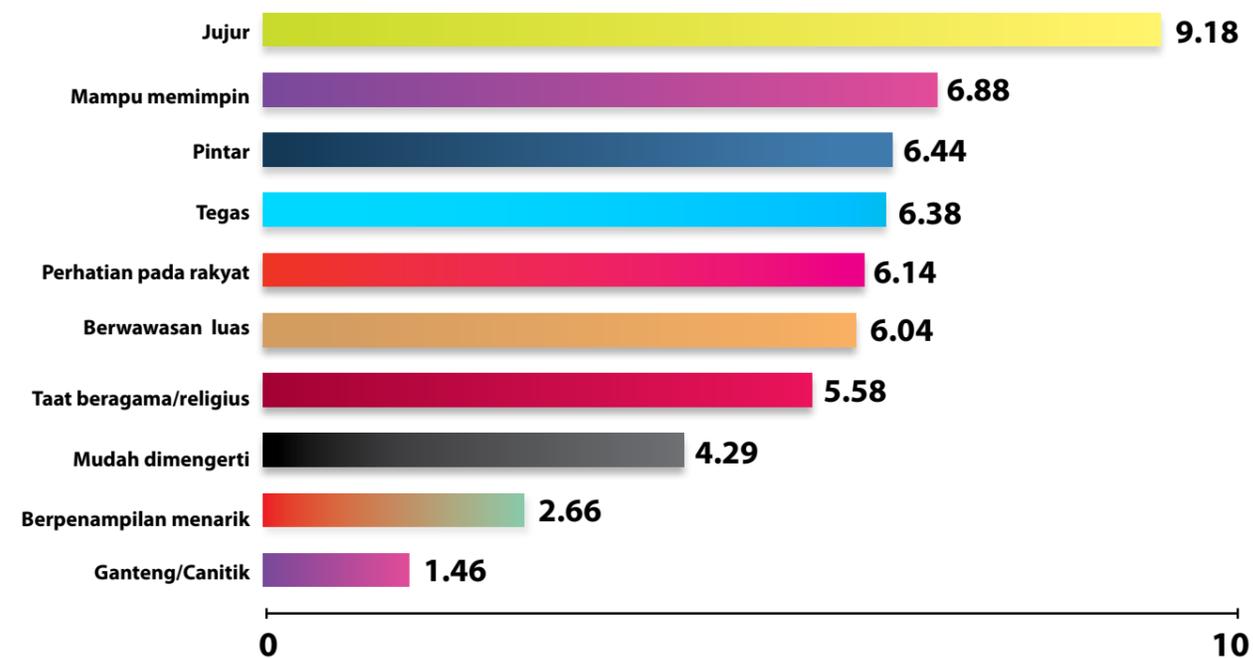


Grafik 55
Obrolan tetangga

Sifat Pemimpin yang Diharapkan

Tidak dapat dihindarkan bahwa memilih elite politik melalui pemilihan langsung presiden dan wakil adalah memilih individu. Mereka akan menjadi elite yang akan mewakili kepentingan orang banyak. Individu memiliki sejumlah aspek: penampilan fisik, kecerdasan, perilaku sosial, moral. Responden diminta untuk mengurutkan sepuluh ciri/sifat mulai yang paling penting hingga yang paling tidak penting yang diharapkan ada pada seorang pemimpin. Berdasarkan frekuensi jawaban dari responden, jujur adalah sifat yang paling banyak dipilih sebagai hal yang paling penting (lihat grafik 56).

Grafik 56
Ciri/sifat ideal yang penting ada pada pemimpin



Lalu kemudian berturut-turut, sifat kepemimpinan, kepintaran, ketegasan, perhatian pada rakyat, berwawasan, religius, mudah dipahami, menarik dan secara fisik ganteng. Persepsi bahwa korupsi di Indonesia sedang memburuk membuat sifat jujur menjadi faktor terpenting bagi para responden pemilih pemula. Aspek yang bersifat penampilan fisik berada paling akhir dari sifat yang dianggap penting. Tampil taat beragama juga bukan merupakan hal yang cukup penting bagi responden. Pilihan ini sejalan dengan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik yang berbasis agama.

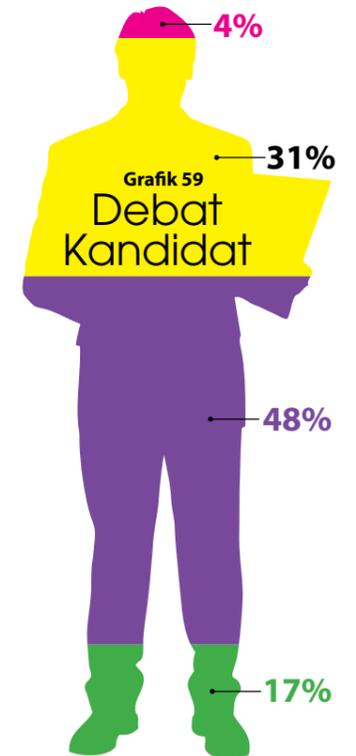
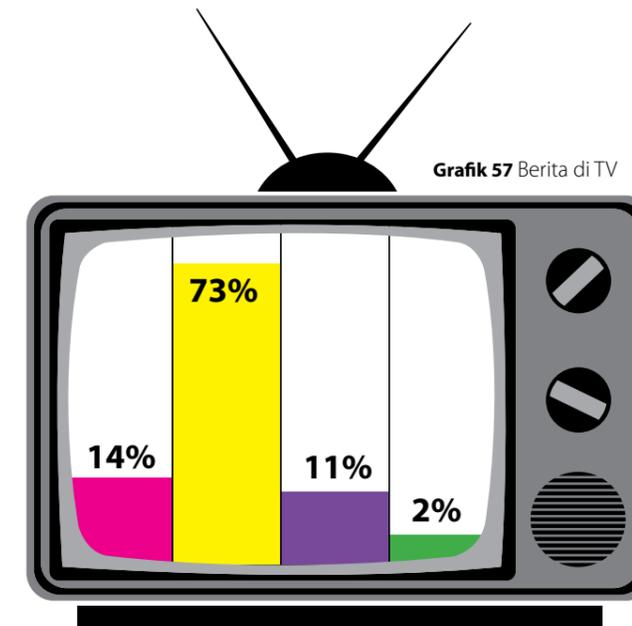
Kegiatan Pemilu dan Akses Informasi

Pemerintah melalui institusi KPU dan juga bersama partai politik peserta pemilu dan para kandidat memiliki kepentingan akan program-program rangkaian kegiatan pemilu. KPU berkepentingan agar partisipasi politik tinggi. Mereka yang berkontestasi, partai politik dan kadernya yang maju sebagai kandidat, sangat berkepentingan agar mereka dikenal, terpilih dan meraih suara terbanyak. Untuk itu mereka akan berkreasi melakukan berbagai kegiatan, kampanye dan sosialisasi diri dengan beragam bentuk. KPU dan Badan Pengawas Pemilu yang akan mengatur teknis pelaksanaannya. Para pemilih juga memiliki kepentingan. Mereka juga perlu meraih informasi sebanyak-banyaknya agar dapat memutuskan pilihan secara tepat. Lalu saluran manakah yang dianggap penting untuk diperhatikan menurut para pemilih pemula muda di DKI Jakarta?

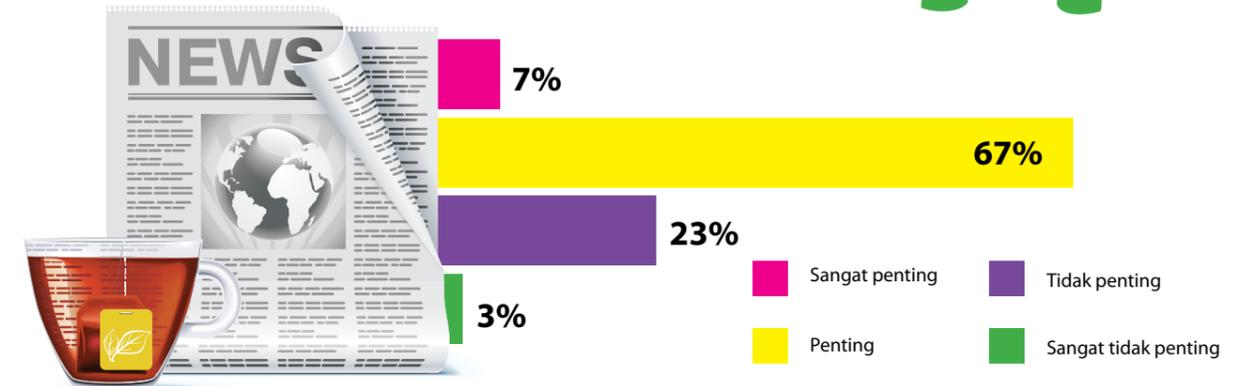
Dalam pencarian informasi mengenai pemilu, calon-calon legislatif (tingkat pusat sampai tingkat II) dan calon presiden/wakil presiden, para responden diajukan pertanyaan medium-medium apa saja yang menurut mereka penting dan tidak penting dalam upaya itu:

- Berdasarkan hasil survei, televisi merupakan sumber informasi yang dinilai paling penting dan paling diminati oleh responden, dibandingkan media-media lainnya. Sebanyak 87% responden menilai televisi penting untuk mengetahui semua hal mengenai pemilu, hanya 13% yang menganggap tidak penting (lihat grafik 57). Ini berkaitan dengan debat kandidat yang dinilai penting sebagai medium untuk mengenal para calon anggota legislatif (tingkat pusat sampai tingkat II) serta calon presiden dan wakil.
- Surat kabar merupakan medium tertinggi kedua yang dijadikan sumber pencarian oleh para responden. Mengikuti perkembangan pemilu melalui surat kabar dinilai penting oleh 74% responden, dan hanya 26% responden yang menilai tidak penting (lihat grafik 58). Surat kabar menjadi tempat informasi yang dinilai memadai dalam memberikan semua informasi mengenai pemilu. Termasuk dalam menyediakan informasi detail mengenai calon anggota legislatif dan capres/cawapres.
- Debat kandidat dinilai penting oleh 65% responden, dan 35% lainnya menganggap kurang atau tidak penting. Dalam FGD, para informan menilai debat kandidat merupakan hal paling penting untuk melihat dan menilai bagaimana para kandidat (terutama Capres/Cawapres) memiliki program dan kemampuan yang mumpuni, serta kemampuan intelektual untuk dijadikan pertimbangan sebagai pilihan (lihat grafik 59). Televisi dinilai merupakan medium yang menyediakan ruang debat kandidat tersebut. Dua hubungan ini menjadi korelatif karena debat kandidat banyak disajikan oleh media televisi.
- Perbincangan di media sosial juga dinilai penting oleh para responden. 54% responden menganggap media sosial penting dan sangat penting, dan 46% lainnya menganggap tidak penting dan sangat tidak penting (lihat grafik 60). Dunia media sosial merupakan bagian penting bagi kalangan muda. Dalam FGD semua informan memiliki keterlibatan dalam media sosial seperti: *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram*, *soundcloud*, *myspace*, dan lain-lain. 60% responden menggunakan internet setiap hari dan 22% yang sering menggunakannya (beberapa kali dalam seminggu).
- Radio tidak menjadi media favorit untuk mendapatkan informasi seputar pemilu meski jumlahnya tidak terlalu rendah, ada 53% yang menilai radio penting, sedangkan 47% menilai tidak penting (lihat grafik 61). Dalam FGD radio umumnya didengar namun tidak secara khusus untuk memperhatikan informasi maupun berita seputar pemilu.
- Iklan kampanye dianggap penting oleh 44% responden, sedangkan 56% lainnya menilai tidak penting (lihat grafik 62).
- Mendatangi kampanye dalam kegiatan pemilu dilihat sebagai aktivitas yang tidak menarik dan dianggap penting 34% responden, dan 66% responden menilai tidak penting (lihat grafik 63). Menurut hasil FGD para informan tidak menganggap penting untuk hadir di lapangan atau hadir di kampanye terbuka, melainkan lebih tertarik mengikuti kampanye pemilu melalui media lain. Bagi para informan, debat kandidat dan surat kabar dinilai lebih menyediakan informasi yang memadai mengenai para kandidat.

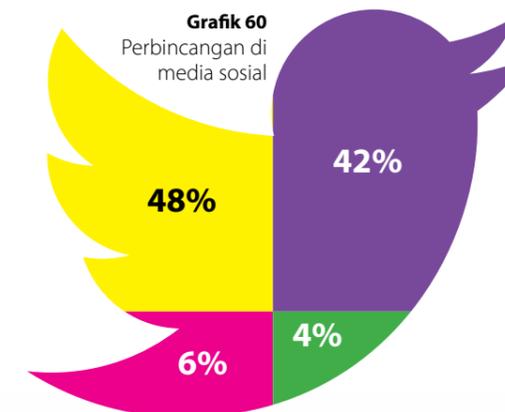
- Poster dan selebaran dianggap penting oleh 25% responden, sedangkan 75% responden lainnya menganggap tidak penting (lihat grafik 64). Dalam FGD mengemuka penilaian bahwa poster dan selebaran cenderung mengganggu keindahan, dan tidak ada satu informan pun yang menjadikan poster maupun iklan kampanye sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan.



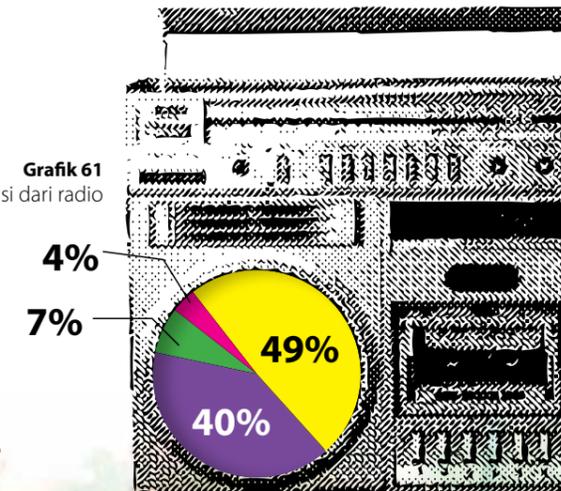
Grafik 58 Berita di koran

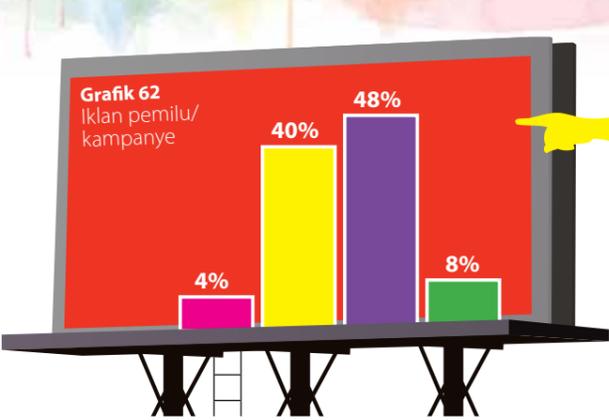


Grafik 60 Perbincangan di media sosial

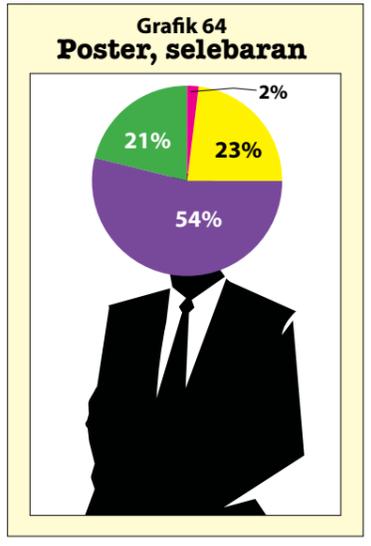
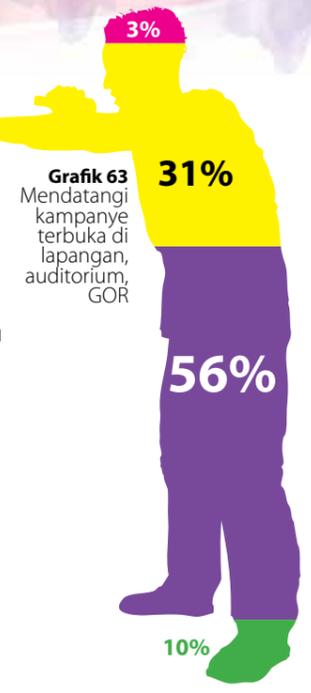


Grafik 61 Informasi dari radio



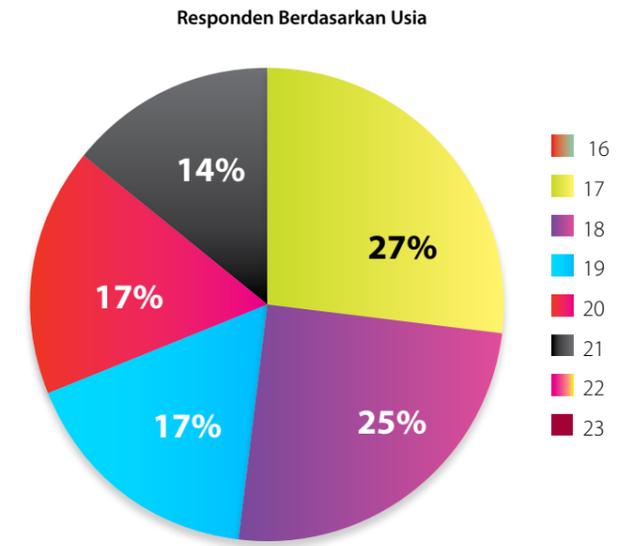
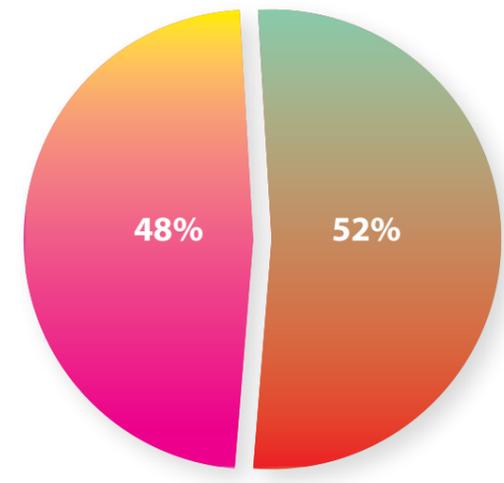


■ Sangat penting ■ Tidak penting
■ Penting ■ Sangat tidak penting



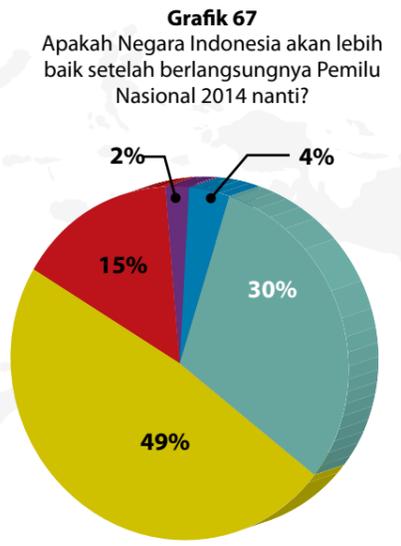
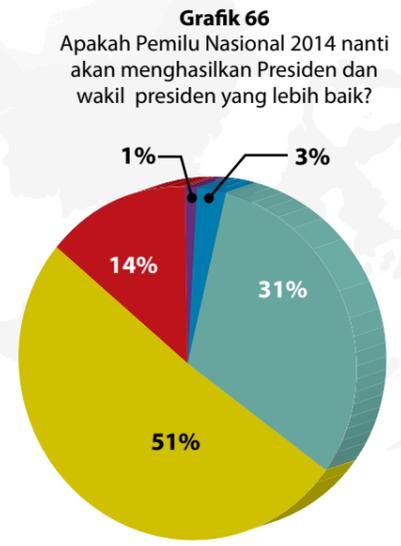
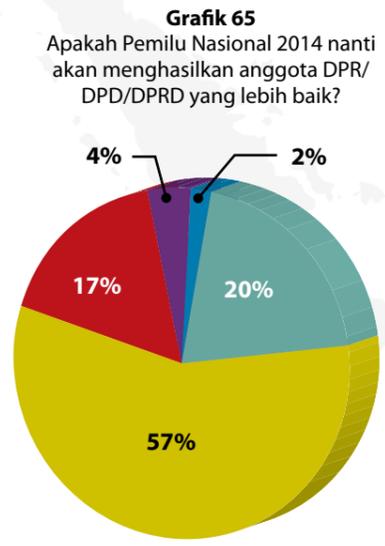
PROFIL RESPONDEN

Proporsi responden berdasarkan jenis kelamin
 Laki-laki = 480 orang; Perempuan = 513 orang; n=993

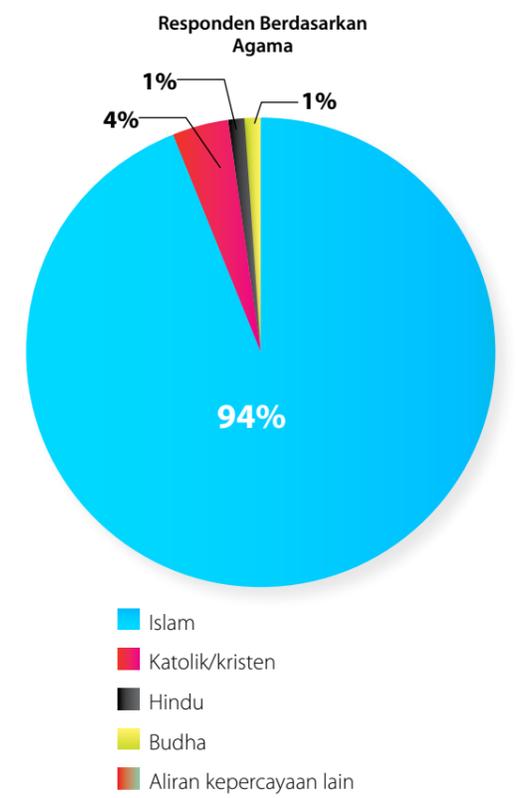
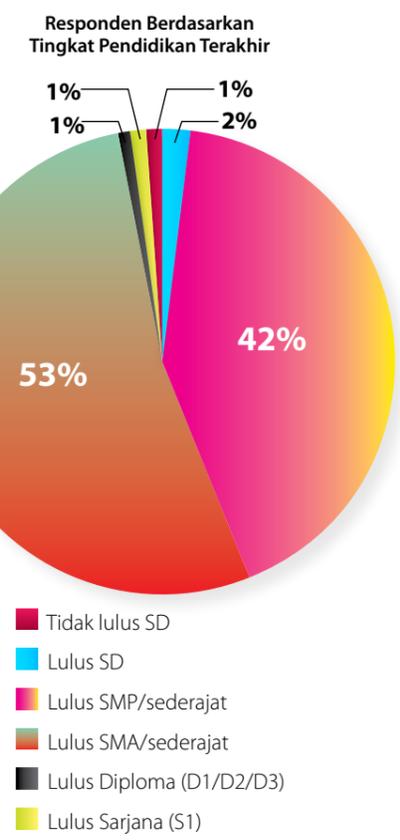


Harapan akan Pemilu 2014

Para pemilih pemula di DKI Jakarta percaya pada sistem demokrasi sebagai sesuatu yang baik dan penting. Potensi berpartisipasi pada Pemilu 2014 nanti juga cukup tinggi. Meskipun demikian responden punya kecenderungan pesimis bahwa keseluruhan hasil Pemilu 2014 nanti akan menghasilkan legislatif yang lebih baik (lihat grafik 65), presiden dan wakil yang lebih baik (lihat grafik 66) dan juga membuat Indonesia menjadi lebih baik (lihat grafik 67).



■ Sangat yakin ■ Yakin ■ Ragu-ragu ■ Tidak yakin ■ Sangat tidak yakin



■ Tidak lulus SD
■ Lulus SD
■ Lulus SMP/ sederajat
■ Lulus SMA/ sederajat
■ Lulus Diploma (D1/D2/D3)
■ Lulus Sarjana (S1)
■ Islam
■ Katolik/kristen
■ Hindu
■ Budha
■ Aliran kepercayaan lain

REFERENSI

Beetham, David. 2006. *Democracy: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld Publications.

Chu, Yun-han, dkk. 2008. *How East Asians View Democracy*. New York: Columbia University Press.

Crick, Bernard. 2002. *Democracy: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Hardoon, Deborah & Heinrich, Finn. 2013. *Global Corruption Barometer 2013*. Transparency International.

Saha, L.J., Murray Print, & Kathy Edwards. 2007. "Youth, Political Parties & The Intention to Vote." Report 4: Youth Electoral Study. Australian Electoral Commission, Canberra.

"Mendagri: Partisipasi Pemilu Terus Melorot", *Tempo.co*, 26 Agustus 2013 (<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/26/078507415/Mendagri-Partisipasi-Pemilu-Terus-Melorot>).

"KPU Klaim Pemilih Pemula Sebanyak 18 Juta", *Sindonews.com*, 26 Desember 2013 (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/26/12/820986/kpu-klaim-pemilih-pemula-sebanyak-18-juta>).

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, *Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013* (KPK, 2013).



Transparency International Indonesia

Jl. Senayan Bawah No. 17, Blok S, Rawa Barat

Jakarta Selatan 12180

Telepon: +62-21-7267827 Fax: +62-21-7208515

<http://ti.or.id>

Email: info@ti.or.id